



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
TAHUN 2017



KATA PENGANTAR WALIKOTA MOJOKERTO

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Alhamdulillah robbil alamin, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Pemerintah Kota Mojokerto tetap dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Setiap Manusia adalah pemimpin, Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kota Mojokerto adalah merupakan pengejawantahanpertanggungjawaban atas semua ikhtiar Pemerintah Kota Mojokerto dalam melayani masyarakat Kota Mojokerto yang dilakukan selama 1 tahun. Pembuatan laporan kinerja ini juga merupakan amanat dari :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamatkan penerapan secara penuh anggaran berbasis kinerja.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini menyajikan secara rinci capaian indikator dan hal-hal yang membuat berhasil atau tidaknya target indikator kinerja sebagaimana yang sudah kami perjanjikan selama setahun yaitu tahun 2017. Kami berusaha menjalankan prinsip transparansi dan akuntabel yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

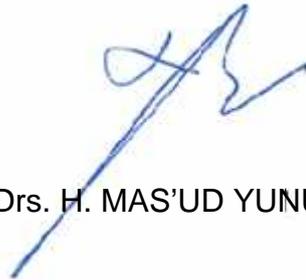
Tetapi walaupun begitu masih banyak yang harus diperbaiki agar apa yang menjadi visi Kota Mojokerto yaitu Terwujudnya Kota Mojokerto sebagai service city yang maju, sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral dapat tercapai.

Wallohulmuwaffiqilaaaqwamitthoriq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mojokerto, Maret 2018

Walikota Mojokerto

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, positioned above the printed name.

Drs. H. MAS'UD YUNUS, M.M.



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO INSPEKTORAT

Jalan Benteng Pancasila No. 23 Telp. & Fax. (0321) 399630
MOJOKERTO

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2017 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang di muat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kota Mojokerto.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara wajar sesuai pedoman pelaporan yang berlaku.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Mojokerto, 19 Maret 2018

INSPEKTUR KOTA MOJOKERTO



Drs. AKHNAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19600320 198003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GRAFIK

BAB PENDAHULUAN

I

A. LATAR BELAKANG

B. STRUKTUR ORGANISASI

C. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

BAB PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II

A. RENCANA STRATEGIS

B. PERJANJIAN KINERJA

BAB AKUNTABILITAS KINERJA

III

A. ANALISIS CAPAIANKINERJA ORGANISASI

MISI I MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

1.1.1

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan

1.1.2

MISI II MENYEDIAKAN PRODUK, JASA, DAN LAYANAN YANG MAJU DAN BERDAYA SAING TINGGI

Sasaran Meningkatnya PDRB per lapanganusahapotensial

2.1.1

Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi

2.2.1

Sasaran Menurunnya Kemiskinan

2.2.2

Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran

2.2.3

Sasaran Meningkatnya Keadilan Gender

2.2.4

MISI III MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN MEMADAAI

Sasaran Meningkatkanketersediaandankualitasinfrastrukturdansaranaprasaran

3.1.1

MISI IV MENINGKATNYA KENYAMANAN, KEAMANAN, DAN KETENTRAMAN LINGKUNGAN

Sasaran4.1.1 MenurunnyaAngkaGangguanKantribmasdanPenegakanPerda

Sasaran MeningkatnyaPerlindunganPemenuhanHakAnak

4.1.2

Sasaran MenurunnyaAngkaKecelakaanLaluLintas

4.1.3

Sasaran MeningkatnyaLingkungan yang Bersih, Nyaman, danSehat

4.2.1

MISI V Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan
(Clean Government)
Sasaran 5.1.1 Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel

C REALISASI ANGGARAN

D PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

BAB PENUTUP

IV

A. KESIMPULAN

B. UPAYA PERBAIKAN

LAMPIRAN

Peran dan Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja tahun 2017	11
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Nilai UN SD/MI	15
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Indikator rata-rata Ujian SMP/MTs	16
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Indikator Angka Harapan Lama Sekolah	20
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJM dan Tahun-Tahun Sebelumnya	20
Tabel 3.5	Capaian Indikator “Angka Kematian Ibu”	21
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	23
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk	25
Tabel 3.8	Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Pertanian dan Perikanan	PDRB 27
Tabel 3.9	Capaian Indikator Kinerja Kontribusi Industri Pengolahan	PDRB 28
Tabel 3.10	Capaian Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan	30
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Indikator Investasi Penanaman Modal	31
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Indikator Angka Kemiskinan	33
Tabel 3.13	Capaian Kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka	34
Tabel 3.14	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender	35
Tabel 3.15	Komponen penyusun indeks pemberdayaan gender	37
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender	37
Tabel 3.17	Perbandingan Capaian indikator “Persentase panjang jalankota dalam kondisi baik” dengan target RPJM	39
Tabel 3.18	Capaian Indikator “Persentase Rumah Sehat”	41
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Persentase Menurunnya Gangguan Kamtibmas	43
Tabel 3.20	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014-2017 dengan target RPJM	43
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Persentase Menurunnya Pelanggaran Perda	45
Tabel 3.22	Perbandingan realisasi tahun 2016 dengan target RPJM dan tahun-tahun sebelumnya	45
Tabel 3.23	Capaian Kinerja Persentase Kota Layak Anak	46
Tabel 3.24	Perbandingan Capaian indikator “angka kecelakaan lalulintas”	47
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi dengan target RPJM dan Realisasi Tahun Sebelumnya	47
Tabel 3.26	Indeks Kualitas Udara	48
Tabel 3.27	Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara	49
Tabel 3.28	Capaian Indikator Indeks Kualitas Air	51
Tabel 3.29	Capaian Indikator Adipura	52
Tabel 3.30	Capaian Indikator Opini BPK Atas Laporan keuangan Daerah	53
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi dengan target RPJM dan Realisasi Tahun Sebelumnya	54
Tabel 3.32	Capaian Indikator Nilai Sakip	55
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi dengan target RPJM	55

	dan Realisasi Tahun Sebelumnya	
Tabel 3.34	Nilai Persepsi, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja Unit pelayanan	56
Tabel 3.35	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan Unit Kerja	57
Tabel 3.36	Capaian Kinerja Indikator nilai rata-rata SKM perangkat Daerah	58
Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi dengan target RPJM dan Realisasi Tahun Sebelumnya	59
Tabel 3.38	Realisasi Anggaran	60
Tabel 3.39	Perbandingan capaian kinerja dan anggaran tahun 2017	70

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan	4
Grafik 1.2	Data PNS yang pensiun dan Meninggal di tahun 2017	5
Grafik 1.3	Data Penduduk Tahun 2017 menurut Kelompok Umur	7
Grafik 3.1	Perbandingan Nilai Rata-rata UN SD?MI tahun 2013-2017	15
Grafik 3.2	Perkembangan Nilai Rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs	17
Grafik 3.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah tahun 2013-2017	18
Grafik 3.4	Angka Kematian IBU (AKI) di Kota Mojokerto Tahun 2012-2017	22
Grafik 3.5	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Mojokerto tahun 2013-2017	24
Grafik 3.6	Perkembangan Persentase Prevalensi Balita Gizi Buruk	25
Grafik 3.7	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian dan Perikanan	27
Grafik 3.8	Laju Pertumbuhan PDRB Industri pengolahan	29
Grafik 3.9	Laju Pertumbuhan PDRB Penyedia akomodasi dan Makanan	30
Grafik 3.10	Perkembangan Angka Kemiskinan tahun 2013-2017	33
Grafik 3.11	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013-2017	34
Grafik 3.12	Perkembangan IPG Kota Mojokerto 2013-2017	36
Grafik 3.13	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender 2013-2017	38
Grafik 3.14	Kualitas Jalan tahun 2017	39
Grafik 3.15	Realisasi Kondisi Jalan Kota Dalam kondisi Baik dari tahun 2014-2017	40
Grafik 3.16	Persentase Rumah Sehat Tahun 2014-2017	41
Grafik 3.17	Jumlah Gangguan kamtibmas	42
Grafik 3.18	Kejadian Pelanggaran Perda	44

BABI PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada rancangan undang-undang atau peraturan daerah tentang Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu.

Penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada salah satu Asas Umum Penyelenggaraan Negara menuntut adanya akuntabilitas kinerja pemerintahan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kewenangan pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, tercermin dalam Rencana Strategis.

Pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, dimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota harus disampaikan kepada gubernur, menteri perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Bapenas, Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto kemudian menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan penilaian terhadap kinerja pemerintah selama kurun waktu Tahun Anggaran 2017 yang didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan kewenangan daerah, Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah membentuk perangkat daerah sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perangkat daerah Kota Mojokerto terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan ;
5. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ;
6. Badan Kepagawaian ;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan ;
9. Dinas Pendidikan ;
10. Dinas Kesehatan ;
11. Dinas Sosial ;
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
13. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ;
14. Satuan Polisi Pamong Praja ;
15. Dinas Perhubungan ;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika ;
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip ;
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
19. Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian ;
20. Dinas Lingkungan Hidup ;
21. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja ;
22. Dinas Pemuda, Olah Raaga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
24. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
25. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ;
26. Kecamatan Magersari ;
27. Kecamatan Prajurit Kulon ;
28. Kecamatan Kranggan.

Untuk melayani warga Kota Mojokerto, Pemerintah Kota Mojokerto berdasarkan data dari Badan kepegawaian, per 31 Desember 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara adalah 2.875 orang yang terdiri dari 1.538

aparaturberjeniskelamindariperempuan dan
aparaturberjeniskelaminlaki-laki.

1.336

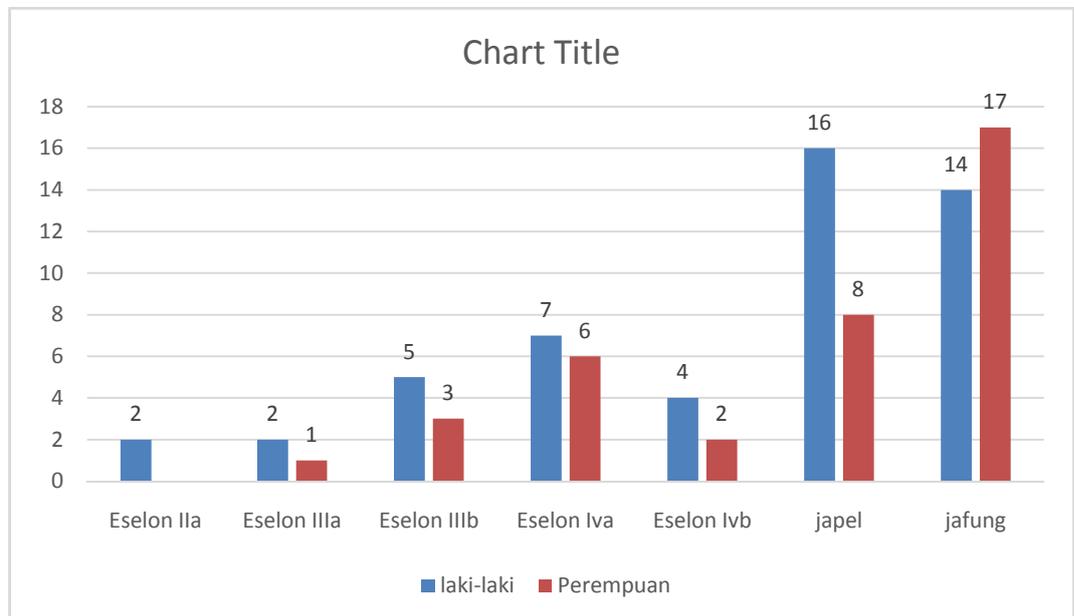
Sedang berdasarkan jenis jabatan, Aparatur Sipil Negara Kota Mojokerto terbagi dalam Jabatandangolongan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

Grafik 1.1
Jumlah PNS berdasarkan jabatan



Komposisi PNS di Kota Mojokerto tersebut, kurang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini telah mengalami paradigma baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meneguhkan sebagai service city. Kekurangan staf baik jabatan pelaksana maupun jabatan fungsional hampir disemua perangkat daerah, bahkan jabatan pendidik terutama guru agama juga hampir dialami oleh hampir separuh SD Negeri di Kota Mojokerto. Setiap Tahun PNS selalu berkurang antara 60 sampai 100 orang pensiun dan meninggal dunia, sementara penambahan pegawai sudah beberapa tahun ini tidak ada. Tahun 2017 PNS yang pensiun sebanyak 69 orang dan yang meninggal sebanyak 18 orang, sebagai tergambar pada data berikut :

Grafik 1.2
Data PNS yang Pensiun dan Meninggal di Tahun 2017



sedang tahun 2018 pegawai yang akan pensiun sebanyak 117 orang yang hampir merata di semua jenjang jabatan. Kekurangan sumber daya manusia tentu sedikit banyak akan mempengaruhi pelayanan tetapi dengan berbagai cara harus diupayakan agar pelayanan tetap berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) berprinsip pada transparansi, akuntabel, responsif dan partisipatif, perlu didukung dengan kemampuan SDM aparatur yang profesional sesuai dengan kompetensi bidangnya.

C. ASPEK STRATEGIS dan PERMASALAHAN UTAMA KOTA MOJOKERTO

Secarageografis Kota Mojokertomempunyailuaswilayah 16.47 Km² yang terletakpadaposisi 7° 27' 0,16" sampaidengan 7° 29' 37,11" Lintang Selatan, dan 112° 24' 14,3" dengan 112° 27' 24" BujurTimur. Kondisi permukaan tanah agak miring ke Timur dan Utara antara 0° – 3°, ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan air laut. Sebagian besar

Luas wilayah Kota Mojokerto berupa perumahan dengan luas wilayah kurang lebih 8.452 km², sisanya berupa persawahan, tegalan, dan lain-lain. Secara lebih terinci peruntukan penggunaan lahan di wilayah Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1) Permukiman : 8,452 Km²
- 2) Persawahan : 6,540 Km²
- 3) Tegal : 0,723 Km²
- 4) Lainnya : 0,755 Km²

Batas-batas wilayah administratif Kota Mojokerto:

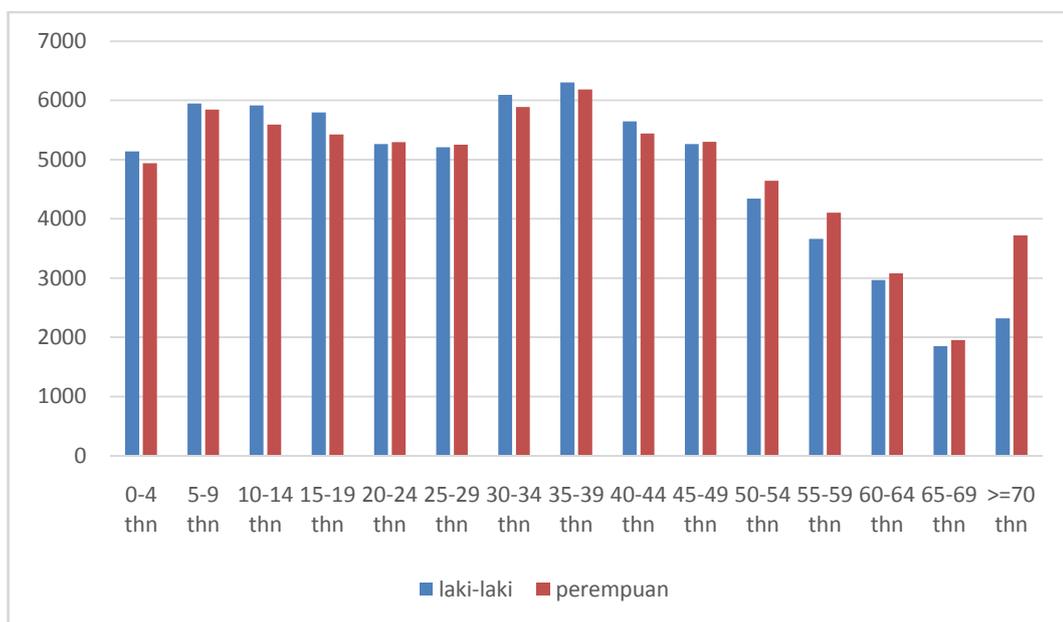
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sooko dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Utara : Sungai Brantas
- Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Luas wilayah yang hanya 16,47 Km² menjadikan Kota Mojokerto sebagai Kota terkecil se Indonesia (kedua setelah Kota Sibolga jika hanya dihitung luas daratannya).

Secara geografis Kota Mojokerto termasuk wilayah gerbangkertosusila yaitu daerah penyangga kota Surabaya yang merupakan pusat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur dan sekaligus ibukota propinsi. Kota Mojokerto juga merupakan daerah perlintasan antara Surabaya dengan daerah lain terutama daerah mataraman, yang didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai membuat tingginya pergerakan orang dan barang. Jarak yang hanya \pm 50 km dari Surabaya menjadikan Kota Mojokerto sebagai salah satu tujuan untuk menjadi kota hunian bagi mereka yang beraktifitas di Surabaya. Apalagi dengan adanya tol sumo yang mempercepat akses mojokerto-surabaya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Mojokerto untuk memberikan pelayanan yang baik dengan menyediakan sarana perumahan, penyediaan air bersih dan infrastruktur pendukung lainnya.

Menurut Data dari Dinas kependudukan dataPencatatan Sipil, jumlah penduduk Kota Mojokerto per 31 Desember 2017 tercatat sebanyak 144.493 jiwa dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 71.729 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 72.764 jiwa. Dan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik1.3
Data Penduduk Tahun 2017 Menurut Kelompok Umur



Sebagaimana daerah yang lain, di Kota Mojokerto masih ditemukan berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu antara lain :

1. Kepadatan penduduk yang mencapai 6.792 per Km² dan luas wilayah yang hanya 16.47 Km² menyebabkan ada banyak daerah kumuh dengan sanitasi yang jelek
2. Sebagian besar wilayah kota Mojokerto mempunyai tingkat resiko bencana banjir, hal ini karena Kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar dan dikelilingi sungai yang 16.47 Km² sudah mengalami pendangkalan akibat banjir bandang tahun 2004.

3. Luas Wilayah yang sempit dibandingkan dengan jumlah penduduk menyebabkan produksi sampah yang banyak sebagaimana persoalan persampahan didaerah perkotaan
4. Luas lahan pertanian yang sangat sempit dan semakin sempit karena perubahan pemanfaatan lahan terutama untuk perluasan perumahan/pemukiman, sehingga sulit memenuhi kebutuhan untuk mencapai swasembada pangan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A	RENCANA STRATEGIS
----------	--------------------------

Berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor... Tahun 2011.. tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2019:

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO SEBAGAI SERVICE CITY YANG MAJU, SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA DAN BERMORAL”.

Dan Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut di atas, untuk mewujudkan arah pandang Pemerintah Kota Mojokerto telah menetapkan misi yang akan diembatkan dan dilaksanakan dalam jangka waktu menengah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi.
3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai
4. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan tentram
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government)

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dengan Sasaran Pembangunan:
 - 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan
 - 2) Meningkatkan Derajat Kesehatan

Sebagai upaya mencapai Misi II yakni Menyediakan Produk, Jasa, dan Layanan yang Maju dan Berdaya Saing Tinggi, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Sasaran Pembangunan:
- 1) Meningkatnya Kontribusi PDRB Per Lapangan Usaha Potensial
- b. Meningkatnya Kesejahteraan dan Keadilan dengan Sasaran Pembangunan:
- 1) Meningkatnya Realisasi Investasi
 - 2) Menurunnya Kemiskinan
 - 3) Menurunnya Tingkat Pengangguran
 - 4) Meningkatnya Keadilan Gender

Sebagai upaya mencapai Misi III Kota Mojokerto yakni Menyediakan Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Baik dan Memadai, dengan demikian Tujuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perkotaan dengan Sasaran Pembangunan:
- 1) Meningkatnya Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan

Sebagai upaya mencapai Misi IV Kota Mojokerto yakni Menciptakan Lingkungan yang Aman, Nyaman, dan Tenram dengan demikian Tujuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Menjadikan Kota Mojokerto Sebagai Daerah yang Aman, Tertib, dan Tenram dengan Sasaran Pembangunan meliputi:
- 1) Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas
 - 2) Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
 - 3) Menurunnya Angka Gangguan Kamtrbmas dan Penegakan Perda
- b. Menjadikan Kota Mojokerto Sebagai Daerah yang Nyaman dengan Sasaran Pembangunan meliputi:

- 1) Meningkatnya Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Sehat

Sebagai upaya mencapai Misi V Kota Mojokerto yakni Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government), dengan demikian Tujuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Governance) dengan Sasaran Pembangunan meliputi:

- 1) Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel

B	PERJANJIAN KINERJA
----------	---------------------------

Dalam upaya implementasi penjabaran visi dan misi Kota Mojokerto sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJMD 2014-2019, Pemerintah Kota Mojokerto telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2017 yaitu :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2017

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN			TARGET
(1)			2
1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan		
	1.1.1.1	Rata-rata nilai UN SD/MI	79,10
	1.1.1.2	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	52,78
	1.1.1.3	Angka rata-rata lama sekolah	10,16
	1.1.1.4	Angkaharapan lama sekolah	14,27
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan		
	1.1.2.1	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH	87,46
	1.1.2.2	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	4,56
	1.1.2.3	Prevalensi balita gizi buruk	0,45
2.1.1	Meningkatnya Kontribusi PDRB per lapangan usahapotensial		
	2.1.1.1	Kontribusi PDRB Pertanian dan perikanan	0,75
	2.1.1.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	11,42
	2.1.1.3	Kontribusi PDRB Penyediaan akomodasi dan makan	6,72
2.1.2	Meningkatnya investasi Penanaman Modal		
	2.1.2.1	Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal	22
2.1.4	Menurunnya kemiskinan		

	2.1.4.1	AngkaKemiskinan	6,03
2.1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran		
	2.1.5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,35
2.1.6	Meningkatnyakeadilan gender		
	2.1.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93.93
	2.1.6.2	IndeksPemberdayaan Gender (IDG)	84.65
3.1.1	Meningkatnyaketersediaandankualitasinfrastrukturdalam ranaprasaranaperkotaan		
	3.1.1.1	Persentasejalankotadalamkondisibaik	72 %
	3.1.1.2	Persentaserumahsehat	92.04 %
4.1.1	Menurunnyaangkagangguan KAMTIBMAS danpelanggaranPeraturan Daerah		
	4.1.1.1	Persentasemenurunnyapelanggaran KAMTIBMAS	7
	4.1.1.2	Persentasemenurunnyapelanggaran PERDA	19,06
4.1.2	. Meningkatkanperlindunganandpemenuhanhakanak		
	4.1.2.1	Kota LayakAnak	Pratama
4.1.3	MenurunnyaAngkaKecelakaanLaluLintas		
	4.2.1.1	Angkakecelakaanlalulintas	120
4.1.4	Meningkatnyalingkungan yang bersih, nyamandansehat		
	4.1.4.1	IndeksKualitasUdara	46
	4.1.4.2	IndeksKualitas Air	30
	4.1.4.3	Adipura	Kirana
5.1.1	Birokrasi yang bersih, melayanidanakuntabel		
	5.1.1.1	Opini BPK ataslaporankeuangan Daerah	WTP
	5.1.1.2	Nilai SAKIP	BB
	5.1.1.3	Nilai rata-rata Survey KepuasanMasyarakat (IKM) Perangkat Daerah	79,68

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas kinerja terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat .

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Mojokerto membuat laporan kinerja tahunan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian kinerja Tahun 2017.

Perjanjian kinerja Tahun 2017 ditetapkan berdasarkan dokumen RPJMD 2014-2019 dengan memuat target indikator kinerja utama Pemerintah Kota Mojokerto.

Analisis dilakukan untuk mengenali faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan pencapaian indikator kinerja utama, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut.

A	ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
----------	--

Analisis tentang capaiantujuan strategis dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja pada Tahun 2017 disajikan per misi dalam uraian berikut:

Misi 1 :Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM)

Misi-1 ini terdiri dari 2 (dua) tujuan yaitu

Tujuan-1.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dengan Sasaran Pembangunan:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan
- 2) Meningkatnya Derajat Kesehatan.:

1.1.1 Sasaran-Meningkatnya Kualitas Pendidikan

capaian masing – masing indikator kinerja pada sasaran-1 adalah sebagai berikut :

1.1.1.1 Rata-rata nilai UN SD/MI.

Ujian Nasional biasa disingkat UN / UNAS adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan.

Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Nilai UN SD/MI :

$$\text{Rata-rata Nilai UN SD/MI} = \frac{\text{Jumlah nilai seluruh siswa SD/MI, SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa SD/MI, SMP/MTs}}$$

Tabel 3.1

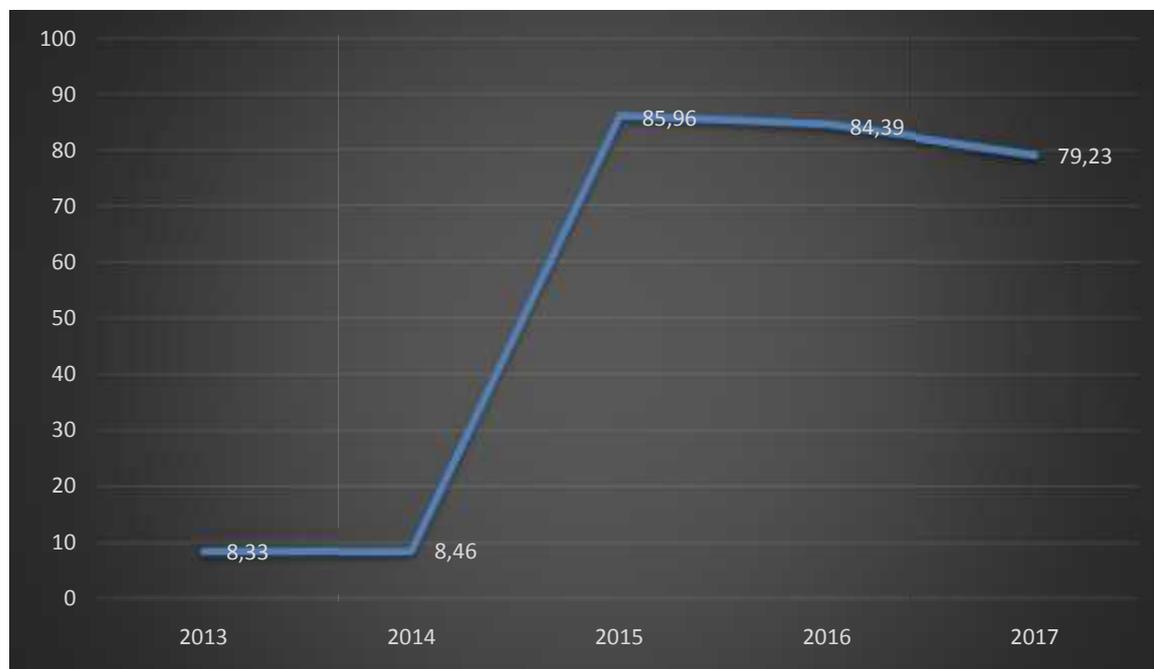
Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Nilai UN SD/MI

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target RPJM	2017		
			Target	realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan				
	1.1.1.1 Rata-Rata Nilai UN SD/MI	79,10	79,10	79,23	100,16%

Ujian Nasional tingkat SD/MI di tahun 2017 ini memang bukan penentu kelulusan siswa, tetapi dijadikan sebagai barometer evaluasi penyelenggaraan pendidikan tingkat SD/MI. Berdasarkan data dari Dinas pendidikan, bahwa nilai rata-rata Ujian Nasional SD/MI pada tahun 2017 adalah 79,23 sehingga target kinerja sebesar 79,10 dapat terpenuhi. Dengan nilai rata-rata UN SD/MI mencapai 79,23 maka target yang ada di RPJM juga tercapai.

Grafik 3.1

Perbandingan nilai rata-rata UN SD/MI tahun 2013-2017



Sumber data : Dinas Pendidikan

Nilai rata-rata UN SD/MI tahun 2013-2014 memakai nilai puluhan sedangkan mulai tahun 2015 memakai nilai ratusan sehingga secara substansi 2 tahun terakhir nilai rata-rata UN SD/MI mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2017 terjadi penurunan nilai rata-rata UN SD/MI sebesar 5,16 point dibanding nilai rata-rata UN SD/MI tahun 2016. Tetapi bila dibandingkan dengan nilai rata-rata ujian nasional tingkat SD/MI se Jawa Timur Jawa Timur yaitu 72,68, maka nilai rata-rata UN SD/MI kota Mojokerto lebih baik dari pada nilai rata-rata UN SD/MI Jawa Timur.

1.1.1.2. Nilai Rata-rata UN SMP/Mts

Pada ujian nasional tingkat SMP/MTs tahun 2017 ada 4 (empat) mata pelajaran (mapel) yang diujikan yaitu :

1. Bahasa Indonesia.
2. Matematika.
3. Bahasa Inggris.
4. IPA.

Untuk Ujian Nasional tingkat SMP/MTs Kota Mojokerto sudah menerapkan UNBK (Ujian Nasional berbasis Komputer). Hanya saja karena ada beberapa sekolah yang fasilitas Laboratorium komputernya kurang, UNBKnya menumpang di SMA. Sementara, untuk jumlah peserta UNBK tingkat SMP di Kota Mojokerto mencapai 2.967 dan komputer yang tersedia sebanyak 1.399 client dan 45 server.

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs :

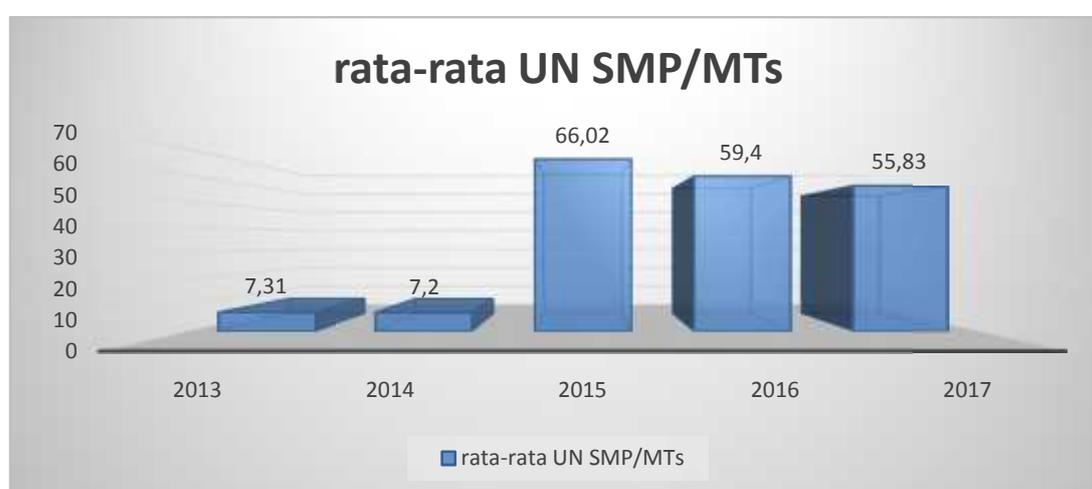
$$\text{Rata-rata Nilai UN SD/MI} = \frac{\text{Jumlah nilai seluruh siswa SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa SMP/MTs}}$$

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator rata-rata Ujian SMP/MTs

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2017		
		Target	realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
	1.1.1.2 Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs	52,78	55,83	101,99%

Realisasi nilai rata-rata Ujian nasional tingkat SMP/MTs ini sebesar 55,83 dibanding dengan target kinerja tahun 2017 memang melebihi target. Termasuk apabila dibandingkan dengan target yang ada di RPJM yaitu 52,78. bila di bandingkan dengan nilai rata-rata Ujian Nasional tingkat SMP/MTs Jawa Timur yang mencapai nilai 56,51 maka nilai rata-rata Ujian Nasional Kota Mojokerto lebih jelek.

Grafik 3.2
Perkembangan nilai rata-rata Ujian Nasional SMP/MTs



Sumber Data : Dinas Pendidikan

perbedaan nilai rata-rata UN SMP/MTs antara tahun 2013-2014 dengan tahun 2015-2017 karena pada tahun 2013-2014 memakai puluhan sedangkan tahun 2015-2017 memakai angka ratusan. Sehingga secara substansi nilai rata-rata UN SMP/MTs dari tahun ke tahun ada kecenderungan mengalami kemunduran.

1.1.1.3 Indikator-Angka rata-rata lama sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Angka rata-rata lama sekolah :

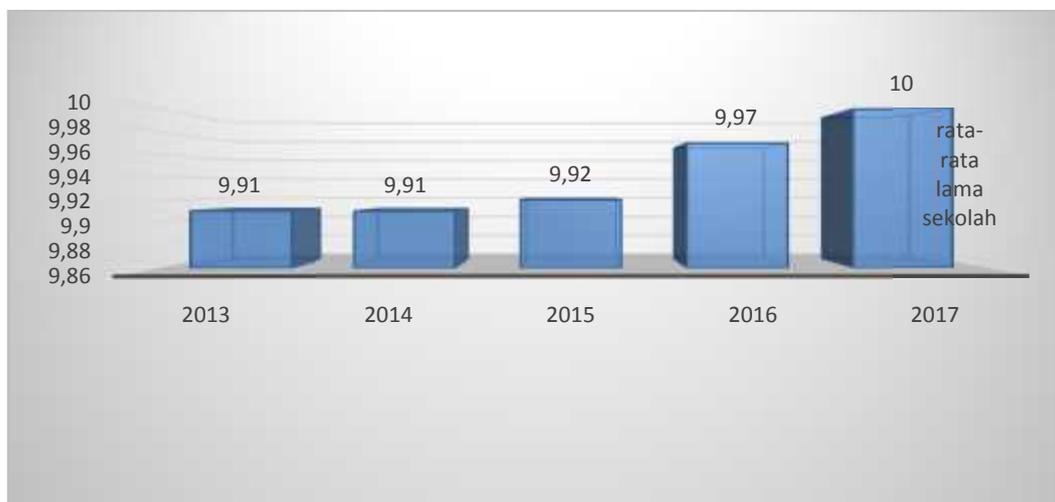
$$\text{Angka rata-rata lama sekolah} = \frac{\text{Jumlah Lama Sekolah Seluruh Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk Seluruhnya}}$$

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2017		
		Target	realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan			
1.1.1.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,16	10	98,42

Angka rata-rata lama sekolah Tahun 2017 ini 10 sehingga target kinerja sebesar 10,16 belum terpenuhi. Begitu pula bila dibandingkan dengan target RPJM sebesar 10,16 maka realisasi kinerja tahun 2017 masih dibawah target yang ada di RPJM.

Grafik 3.3
Angka rata-rata lama sekolah tahun 2013-2017



Dari Tahun ke tahun ada tren positif pada kinerja indikator angka rata-rata lama sekolah. Bila dibandingkan dengan Kota yang setipe seperti Kota Blitar angka rata-rata lama sekolah di Kota Mojokerto juga lebih baik, karena Kota Blitar angka rata-rata lama sekolahnya masih 7,23. Bahkan rata-rata lama sekolah di Kota Mojokerto sudah melampaui target nasional sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menargetkan rata-rata lama sekolah sebesar 8,8 tahun pada tahun 2019. Capaian yang baik ini disebabkan Kota Mojokerto melakukan :

- a. Program Kota Mojokerto berlingkungan pendidikan (PKMBP) yang pelaksanaannya didasarkan pada peraturan Walikota Nomor 17 tahun 2009 tentang Program Kota Mojokerto berlingkungan pendidikan dengan kegiatan antara lain jam wajib belajar (jam 18.00-19.00) yang dilaksanakan oleh kader dan motivator Jam wajib Belajar. Kader dan Motivator jam wajib belajar ini selain memantau pelaksanaan jam wajib belajar juga memantau apakah ada anak usia sekolah yang tidak sekolah. Untuk dilaporkan kepada lurah agar mendapat penanganan yang tepat.
- b. Kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mojokerto, dimana BAZNAS Kota Mojokerto memberikan bantuan biaya personal pendidikan yang belum ditanggung oleh Pemerintah Kota bagi anak keluarga miskin.

1.1.1.4 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Angka harapan lama sekolah :

$$\text{Angka harapan lama sekolah} = \frac{\text{Jumlah penduduk x lama pendidikan yang dilakukan}}{\text{Jumlah penduduk 15 thn ketas yg sedang sekolah atau telah berijasah}}$$

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Angka Harapan Lama Sekolah

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan			
	1.1.1.4 Angka Harapan Lama Sekolah	14,27	13,93	97,62

Realisasi kinerja indikator angka harapan lama sekolah ini memang tidak sesuai dengan target kinerja di tahun 2017 maupun target RPJM sebesar 14,27. Tetapi angka harapan lama sekolah di kota Mojokerto ini masih lebih baik dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah Jawa Timur yang mencapai 12,98 bahkan bila dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah nasional yang mencapai 12,72.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJM dan Tahun Tahun Sebelumnya

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target RPJM	REALISASI				
			2013	2014	2015	2016	2017
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan						
	1.1.1.4 Angka Harapan Lama Sekolah	14,27	13,24	13,30	13,33	13,80	13,93

Sumber data : BPS Kota Mojokerto

Dalam rangka meningkatkan angka harapan lama sekolah, pemerintah Kota Mojokerto sudah melaksanakan Program Wajib Belajar 12 tahun. Melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan peraturan Walikota Mojokerto Nomor 129 tahun 2013 tentang tim program wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, telah melaksanakan program wajib belajar Pendidikan Menengah 12 tahun. Dan sebagai langkah kongkritnya, pemerintah Kota Mojokerto telah memberikan biaya operasional sekolah bagi murid yang menjadi penduduk Kota Mojokerto. Hanya saja sejak adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah yang mengalihkan urusan pendidikan Menengah, menjadikan Pemerintah Kota kesulitan untuk mengalokasikan anggaran bagi pendidikan menengah seperti tahun sebelumnya dimana pemerintah kota memberikan BOS bagi sekolah jenjang pendidikan Menengah di Kota Mojokerto sebesar Rp 91.700,- tiap siswa SMU dan Rp. 126.700,- untuk siswa SMK.

1.1.2 Sasaran-Meningkatnya Derajat Kesehatan

Capaian sasaran-Meningkatnya capaian indeks kesehatandapat diukur melalui 3 indikator kinerja yang masing- masing diuraikan sebagai berikut :

1.1.2.1 Indikator-Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH

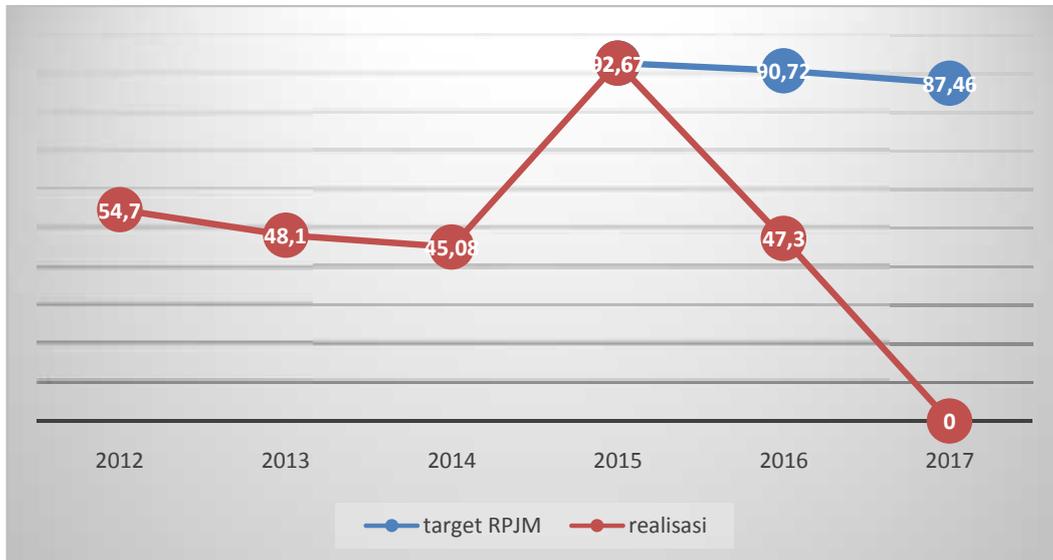
Kematian ibu yang dimaksudkan adalah kematian ibu karena gangguan kehamilan atau penanganannya (bukan karena kecelakaan atau kasus insidental) selama masa kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas. Angka kematian ibu dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 3.5
Capaian Indikator “Angka Kematian ibu”

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=3/2X100
1.1.2	Meningkatnya capaian indeks kesehatan			
	1.1.2.1 Angka Kematian ibu	87,46/1000KH	0	100

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, jumlah kematian ibu yang terjadi setiap tahunnya hanya kisaran sebanyak 1 kasus saja. Pada tahun 2016 hanya terdapat 1 (satu) kasus kematian Ibu saja. Capaian Kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Mojokerto tahun 2016 47,3/100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 ini menjadi 0 KH (tidak ada kasus atau Zero Death).

Grafik 3.4
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Mojokerto
Tahun 2012 – 2017



Capaian ini sudah dibawah target yang ditetapkan sesuai target tujuan Pembangunan Melenium/SDGs, yaitu sebesar < 102 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini tetap perlu diwaspadai, karena 1 kematian saja rasio angka kematiannya akan naik cukup signifikan. Capaian Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2016 masih dibawah target RPJM yang telah ditetapkan yaitu 87,46 /100.000 KH.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka menekan angka kematian ibu, antara lain melalui pendekatan yaitu :

- a) Mengoptimalkan kualitas ANC terpadu di seluruh sarana pelayanan kesehatan.
- b) Pemenuhan sarana prasarana baik pelayanan dasar sampai dengan pelayanan rujukan.
- c) Peningkatan kompetensi petugas kebidanan dengan pendampingan spesialisik dengan dokter Spesialis Anak (DSA) dan dokter Spesialis Genekologi (SPOG) bagi petugas bidan dan dokter puskesmas secara rutin.
- d) Peningkatan kompetensi petugas kesehatan dengan pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) dan PPGDON (Pertolongan pertama gawat darurat Obstetric Neonatal) baik bidan maupun dokter terutama

pertolongan persalinan pada bayi baru lahir dengan asfiksia (gagal bernafas).

- e) Penguatan Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) dan Satgas PENAKIB.
- f) Koordinasi lintas sektor melalui Forum Komunikasi Rujukan dengan RS Rujukan Jejaring Kamar Bersalin dan PONED atau “JABERNED”
- g) Pendampingan Bumil Risti “DABU” oleh PKK / LSM dan Motivator Kesehatan.
- h) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam medeteksi ibu hamil resiko tinggi.
- i) Pembiayaan Persalinan bagi Warga Kota secara gratis bagi yang tidak terdaftar BPJS dan Jamkesmas.
- j) Pemantauan dan penanganan seluruh kasus komplikasi kebidanan pada sasaran Ibu Hamil Risti oleh petugas dan kader.

1.1.2.2 Indikator-Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH

Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai dengan satu hari sebelum bayi berusia satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. AKB dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, karena bayi adalah kelompok yang paling rentan terkena dampak dari suatu perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi.

Tabel 3.6

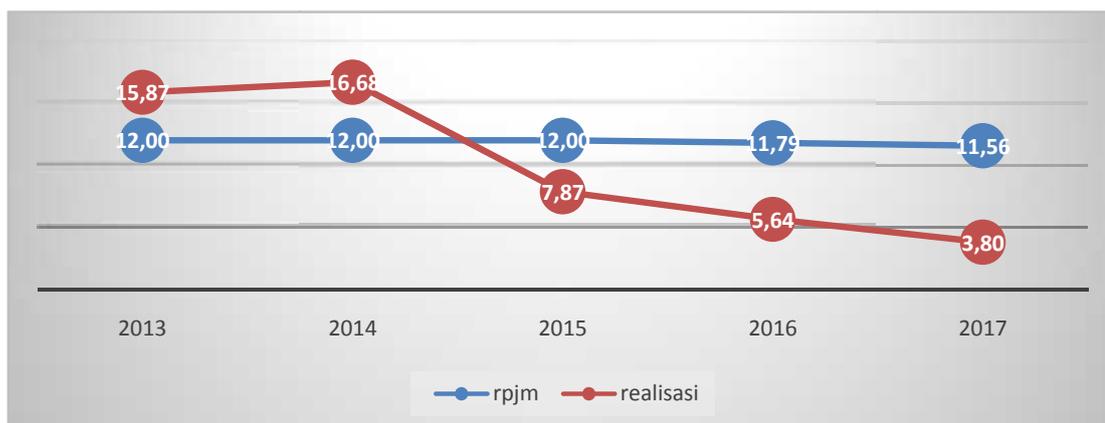
Capaian kinerja Indikator Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=3/2X100
1.1.2.	Meningkatnya capaian indeks kesehatan			
	1.1.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	4,56	3,8	120%

Pada tahun 2017 jumlah kematian bayi yang terjadi di Kota Mojokerto sebanyak 3,8 per 1.000 KH (8 bayi). Adapun penyebab kematian bayi tersebut dikarenakan kelainan / Cacat bawaan, meliputi : Hernia Diafragmatika, Onphacocele, Kelaianan Jantung dan Adanya Infeksi Virus penyakit.

Grafik 3.5

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Mojokerto Tahun 2013 – 2017



Capaian Angka kematian bayi (AKB) Kota Mojokerto terbilang jauh lebih rendah dibanding target yang ditetapkan dalam SDGs yaitu 12/1.000 KH atau target nasional yaitu 24/1.000 KH pada tahun 2019. Pada tahun 2017 AKB tercatat sebesar 3,8 per 1000 kelahiran hidup, telah memenuhi target tahun 2017 dalam RPJM yaitu kurang dari 11,56/1.000 KH. Angka kematian Bayi di tahun 2017 ini juga lebih baik bila dibandingkan dari AKB ahun-tahun sebelumnya seperti pada tahun 2016 yang tercatat sebesar 5,64 per 1000 kelahiran hidup (12 bayi).

1.1.2.3 Indikator-Prevalensi balita gizi buruk

Prevalensi balita gizi buruk merupakan persentase balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari dengan status gizi berat badan sangat kurang (BB/U < 3 SD) terhadap jumlah balita usia 0 s/d 59 bulan 29 hari yang ditimbang (D). Gizi buruk merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila

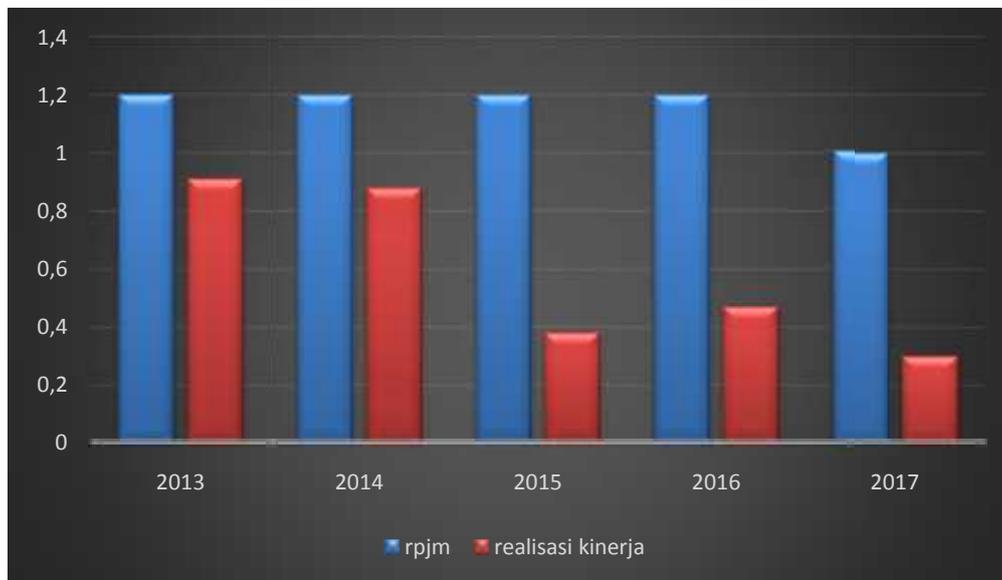
berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Untuk pengkategorian status gizi balita pada indikator ini, dipergunakan standar perhitungan BB/U.

Tabel 3.7
Capaian kinerja Indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=3/2X100
1.1.2.	Meningkatnya capaian indeks kesehatan			
	1.1.2.3 Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,45	0,30	150%

Adapun jumlah kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Mojokerto tahun 2017 sebanyak 23 kasus, terhadap jumlah balita yang ditimbang (D) sebanyak 7.814 balita, sehingga persentase prevalensinya tahun 2017 sebesar 0,30%.

Grafik 3.6
Persentase Balita Gizi Buruk



Sumber data : Dinas kesehatan

Meskipun capaian ini kinerja melebihi target, tapi ini tetap perlu diwaspadai karena dengan masih adanya ditemukannya balita dengan berat badan

dibawah garis merah (BGM) menandakan bahwa perlu adanya peningkatan upaya-upaya untuk menemukan dan menangani secara lebih dini balita-balita dengan gizi kurang, sehingga tidak sampai berubah menjadi status gizinya turun menjadi gizi buruk. Sedangkan capaian balita gizi buruk mendapat perawatan telah berhasil mencapai 100% (ada 1 balita gizi buruk di tahun 2017 yang mendapat perawatan). Kondisi yang baik ini juga akan mendorong capaian Jawa Timur yang menargetkan prevalensi balita gizi buruk sebesar 2,5.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain :

- 1) Pemberian ASI eksklusif.
- 2) Kunjungan petugas puskesmas ke rumah penderita kasus gizi buruk minimal 3 kali kunjungan dalam 1 minggu untuk memantau kesehatannya.
- 3) Mendorong peningkatan peran serta masyarakat untuk mengatasi masalah gizi pada balita (baik gizi kurang maupun gizi buruk) melalui Taman Pemulihan Gizi (TPG).
- 4) Pemberian PMT pemulihan bagi bayi dan balita BGM (bawah garis merah).
- 5) Pemeriksaan laboratorium telur cacing untuk penderita gizi kurang (balita 2T/2 kali timbang tidak naik di Posyandu), BGM dan gizi buruk untuk dilakukan Rujukan ke Puskesmas.
- 6) Melakukan Rujukan balita dengan permasalahan gizi dan atau menderita penyakit infeksi ke dokter umum dan dokter Spesialis Anak.
- 7) Inovasi Gerakan Kelorisasi dengan penanaman pohon kelor, bekerjasama dengan Dinas Pertanian serta dilaksanakannya pelatihan Kader Posyandu Mahir Gizi dan Demo masak Kelor di Posyandu.

Misi-2 :2. Menyediakan produk, jasa dan layanan yang maju dan berdaya saing tinggi

2.1 Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan dan Keadilan dengan Sasaran Pembangunan

2.1.1 Sasaran-Meningkatnya PDRB per lapangan usaha potensial

Capaian sasaran-2 dapat diukur melalui 3 indikator kinerja yang masing-masing diuraikan sebagai berikut :

2.1.1.1 Indikator-Kontribusi PDRB Pertanian dan perikanan

Kategori ini mencakup Subkategori Pertanian, dan Perikanan yang terdiri dari : tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, dan Subkategori Perikanan.

Tabel 3.8

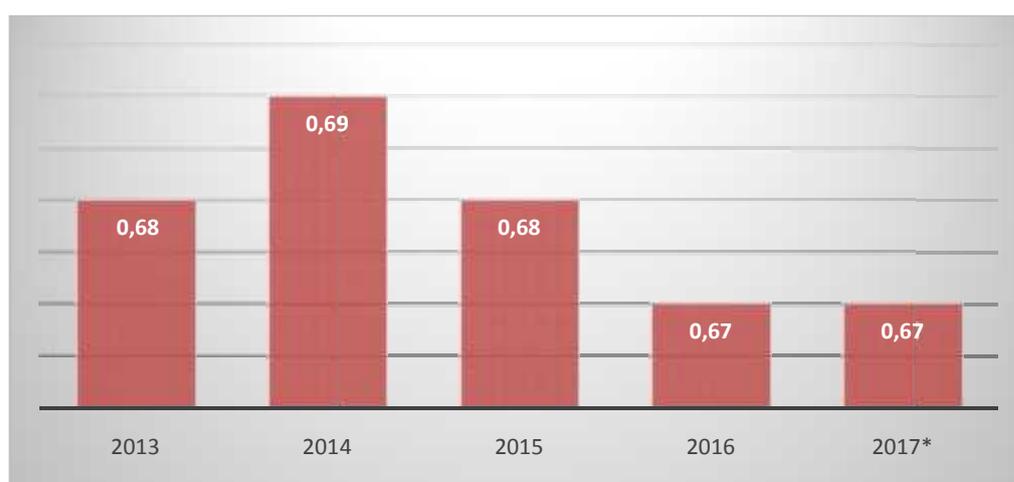
Capaian Indikator Kinerja Kontribusi PDRB Pertanian dan Perikanan

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
2.1.1	Meningkatnya PDRB per lapangan Usaha Potensial			
	2.1.1.1 Kontribusi PDRB pertanian dan Perikanan	0,75	0,67	89,33%

Pada tahun 2017 lapangan usaha Pertanian, dan Perikanan memberi kontribusi terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 0,67 persen. Subkategori Tanaman Pangan merupakan penyumbang terbesar di lapangan usaha Pertanian, dan Perikanan yaitu tercatat sebesar 0,61 persen dari seluruh perekonomian Kota Mojokerto. Dilihat dari target tahun 2017, maka capaian kinerjanya mencapai 89,33% Realisasi kinerja kontribusi PDRB Pertanian dan Perikanan jauh lebih kecil daripada target di RPJM sebesar 2,24 %.

Tabel 3.7

Laju pertumbuhan PDRB Pertanian dan Perikanan



* = Data Sangat Sementara
Sumber : BPS Kota Mojokerto

Jika diamati perkembangannya dari tahun 2014, kontribusi lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berangsur-angsur turun. Kondisi ini secara umum disebabkan oleh semakin berkurangnya lahan untuk sektor pertanian, karena dari lahan yang ada sebagian besar sudah dimanfaatkan untuk sektor real properti maupun untuk industri. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena pola pembangunan di Kota Mojokerto yang sudah tidak tergantung lagi kepada sektor sumber daya alam. Dimana perkembangan kota menuju ke arah kota jasa dan perdagangan yang menuntut adanya peningkatan di sektor sumber daya manusia serta sektor pendukung lain untuk menuju kepada kota transisi yang dapat menyangga ibukota propinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya. Walaupun begitu, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan melalui.

1. Pembudiyaaan ikan khas Mojokerto yaitu Ikan rengkik ;
2. Memasyarakatkan penggunaan lahan sekitar rumah untuk ditanami berbagai macam sayuran
3. Memberikan bantuan kolam ikan dan benihnya.

2.1.1.2 Indikator-Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Pada tahun 2017, Industri Pengolahan, lapangan usaha yang menyumbang peranan terbesar adalah subkategori Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar 4,64persen, subkategori Industri Makanan dan Minuman sebesar 2,85persen dan subkategori Industri Pengolahan Tembakau sebesar 2,68 persen. Sedangkan subkategori yang lain memiliki kontribusi di bawah satu persen.

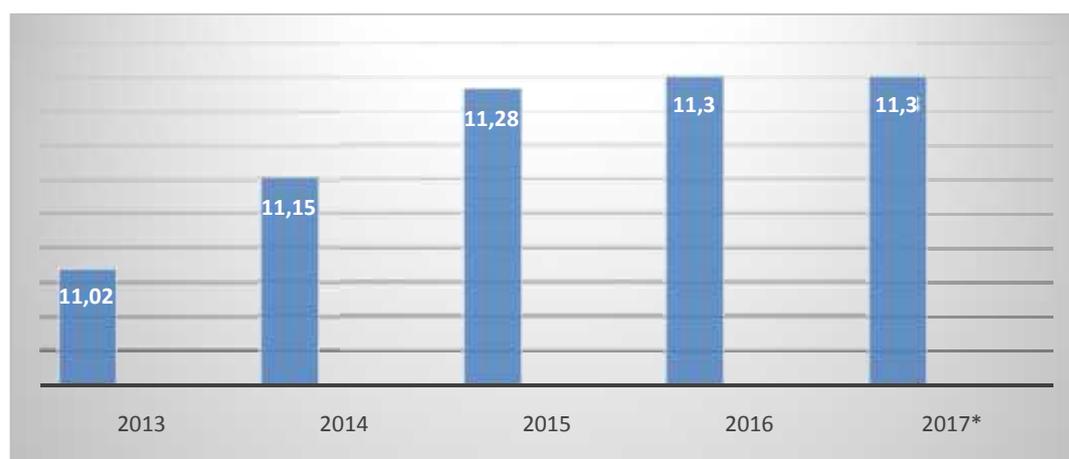
Tabel 3.9

Capaian Indikator Kinerja Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

SASARAN/INDIKATOR				Tahun 2017		
				Target	Realisasi	Capaian
2.1.1	Menigkatnya PDRB per lapangan Usaha Potensial					
	2.1.1.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		11,42	11,30	98,94 %

Realisasi indikator Kontribusi PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2017 sebesar 11,30 bila dibandingkan dengan target kinerjanya yaitu sebesar 11,42 maka capaian kinerjanya 98,94 %. Realisasi ini memang sama dengan keadaan tahun 2016 tetapi bila dibandingkan dengan target yang ada di RPJM sebesar 6,88 jauh lebih baik.

Grafik 3.8
Laju pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan



Sumber Data : BPS Kota Mojokerto

* = data sangat sementara

Dari tahun ke tahun capaian kinerja indikator kontribusi PDRB industri pengolahan ini mempunyai kecenderungan meningkat. Berbagai program dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dibidang industri pengolahan seperti pelatihan, pembangunan gedung workshop alas kaki, memakai batik khas Mojokerto pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dan kampanye memakai produk kota Mojokerto. Di Kota Mojokerto terdapat berbagai macam industri, diantaranya yaitu industri batik tulis, industri miniatur perahu layar, industri kerajinan gips, industri onde-onde dan keciput, industri sepatu, industri cetakan kue dan lain-lain. Namun dari sekian banyak industri yang ada, Kota Mojokerto merupakan sentra industri sepatu, dimana sebagian besar industri pengolahan merupakan industri yang bergerak di bidang alas kaki sandal maupun sepatu

2.1.1.3 Indikator-Kontribusi PDRB Penyediaan akomodasi dan makan

Pada tahun 2017, PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kota Mojokerto sebesar 6,82 persen, di mana sebesar 6,73persen disumbangkan oleh lapangan usaha subkategori Penyediaan Makanan Minum dan kontribusi dari subkategori penyediaan akomodasi sebesar 0,09 persennya. Rendahnya kontribusi dari subkategori penyediaan akomodasi tersebut mengingat di Kota Mojokerto hanya terdapat 9 hotel yaitu Hotel Naga Mas, Hotel Raden Wijaya, Hotel Surya Kertajaya, Hotel Tenera, Hotel Slamet, Hotel Sekar Putih, Hotel Tegal Sari, Hotel Surya Mojopahit dan hotel D'resort.

Tabel 3.10

Capaian Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
2.1.1	Meningkatnya PDRB per lapangan Usaha Potensial			
	2.1.1.3 Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan	6,72	6,82	101,48 %

Realisasi kinerja indikator kontribusi Penyediaan akomodasi dan makan di tahun 2017 sebesar 6,82 lebih baik dibandingkan dengan target kinerja tahun 2017 dan juga target yang ada di RPJM sebesar 6,72%.

Grafik 3.9

Laju pertumbuhan PDRB penyediaan akomodasi dan makanan



Sumber Data : BPS Kota Mojokerto

* = Data sangat sementara

Secara keseluruhan, kategori ini mencatatkan laju pertumbuhan yang cenderung positif. Dan laju pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2016 yang tumbuh 6,82 persen atau mengalami kenaikan 0,40 point dibandingkan tahun 2015 yang hanya 6,42 persen.

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto melalui dinas perindustrian dan perdagangan maupun dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk terus meningkatkan kontribusi khususnya sektor penyediaan makanan.

2.2 Tujuan-Meningkatnya Kesejahteraan dan Keadilan dengan Sasaran Pembangunan

2.2.1 Meningkatkan Realisasi Investasi

2.2.1.1. Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal

Investasi adalah penanaman modal untuk biasanya berjangka panjang dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai kompensasi secara profesional atas penundaan konsumsi, dampak inflasi dan resiko yang ditanggung

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha

Tabel 3.11
Capaian kinerja Indikator Investasi Penanaman Modal

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=3/2X100
2.2.1	Meningkatnya Realisasi Investasi			
	2.2.1.1 Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal	22	-29,40	-133,63%

Tahun 2017 terdapat investasi penanaman modal di Kota Mojokerto dengan nilai investasi sebesar Rp.87.123.874.000,- mengalami kemerosotan bila dibandingkan dengan tahun 2016, dimana investasi yang masuk ke Kota Mojokerto adalah Rp. 123.406.200.000,-. Ada penurunan pertumbuhan sebesar -29,40%, sehingga target pertumbuhan sebesar 22% tidak tercapai. Bahkan target yang ada di RPJM sebesar 7,38% pun tidak bisa dipenuhi. Ketidaktercapaian target ini karena Kota Mojokerto sebagai kota yang sudah padat penduduknya sehingga investasi skala besar seperti pendirian pabrik besar sulit untuk dilakukan.

2.2.2 Menurunnya Kemiskinan

2.2.2.1 Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

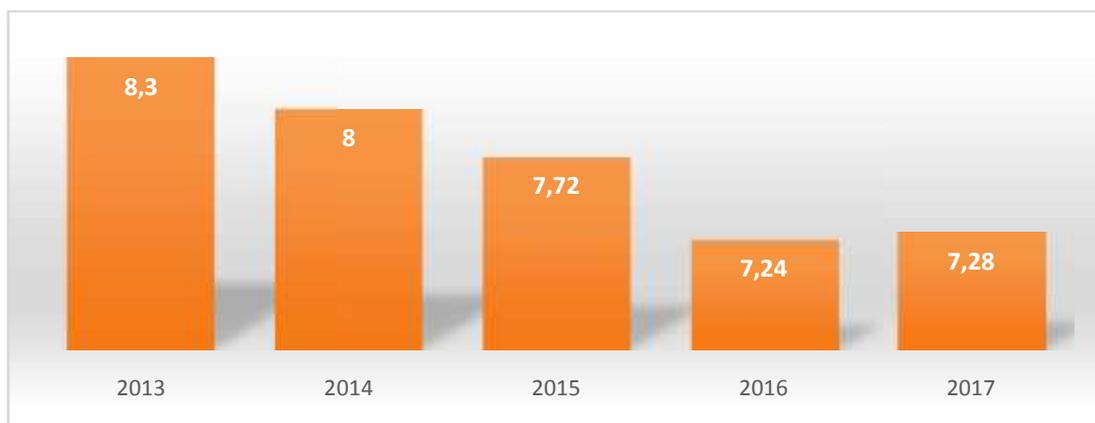
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan yang digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi, serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan terbut disebut garis kemiskinan.

Tabel 3.12
Capaian kinerja Indikator Angka kemiskinan

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=3/2X100
2.2.2	Menurunnya Kemiskinan			
	2.2.3.1 Angka Kemiskinan	6,03	7,28	82,83%

Angka kemiskinan di Kota Mojokerto Tahun 2017 sebanyak 7280 jiwa, yang berarti target kinerja tahun 2017 tidak bisa dipenuhi. Dengan angka kemiskinan sebesar 7,28 ini maka target yang ada di RPJM sebesar 6,03 juga tidak bisa dicapai.

Tabel 3.10
Perkembangan Angka Kemiskinan Tahun 2013-2017



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka kemiskinan tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 memang sedikit menurun, tetapi secara umum dari tahun ke tahun, tren angka kemiskinan menurun. Angka Kemiskinan Kota Mojokerto masih lebih baik bila dibandingkan dengan kota se tipe seperti Kota Blitar yang pada tahun 2017 mencapai 11,22. Bila diprosentase maka angka kemiskinan Kota Mojokerto juga lebih baik karena penduduk yang miskin di Jawa Timur masih 11,85% (per 1 September 2017) sedangkan Kota Mojokerto penduduk yang miskin hanya 5,04%.

2.2.3 Menurunnya Tingkat Pengangguran

2.2.3.1 Indikator : Tingkat Pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Pengukuran Capaian Kinerja Indikator tingkat pengangguran terbuka :

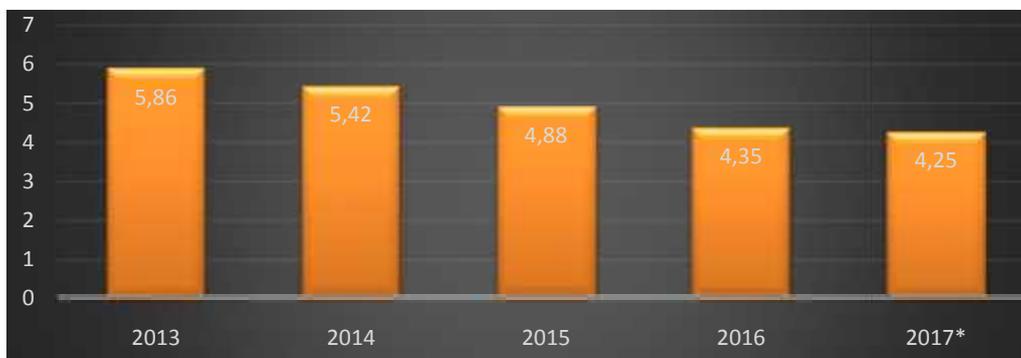
$$\frac{\text{Pencari kerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100 \%$$

Tabel 3.13
Capaian kinerja Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=2/3X100
2.2.3	Menurunnya Tingkat pengangguran			
	2.2.3.1 Tingkat pengangguran terbuka	4,35	4,25	102,35%

Tahun 2017, Realisasi indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka ini 4,25 ini lebih baik dari target kinerjanya. Dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa timur per Pebruari 2017 sebesar 4,10 maka tingkat pengangguran terbuka kota Mojokerto dibawah capaian Jawa Timur.

Grafik 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2013-2017



Data BPS Kota Mojokerto

* = Data sangat sementara

Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif. Rata-rata penurunan tiap tahunnya lebih dari 0,5 %. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran terbuka antara lain :

1. Job fair untuk pencari kerja baik yang bekerja sama dengan kementerian tenaga Kerja maupun yang bekerja sama dengan sekolah-sekolah kejuruan
2. Pelatihan kewirausahaan
3. Pelatihan keterampilan kerja

2.2.4 Meningkatnya Keadilan Gender

2.2.4.1 Indikator :Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks pembangunan gender (IPG) atau gender development index (GDI) merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. Membangun kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Terdapat beberapa kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya yang cenderung patriaki, ketidaktepatan interpretasi ajaran agama, dan kebijakan politik. Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki yang dijamin perundang-undangan yang dihasilkan oleh negara maupun masyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan negara meliputi partisipasi dalam program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar.

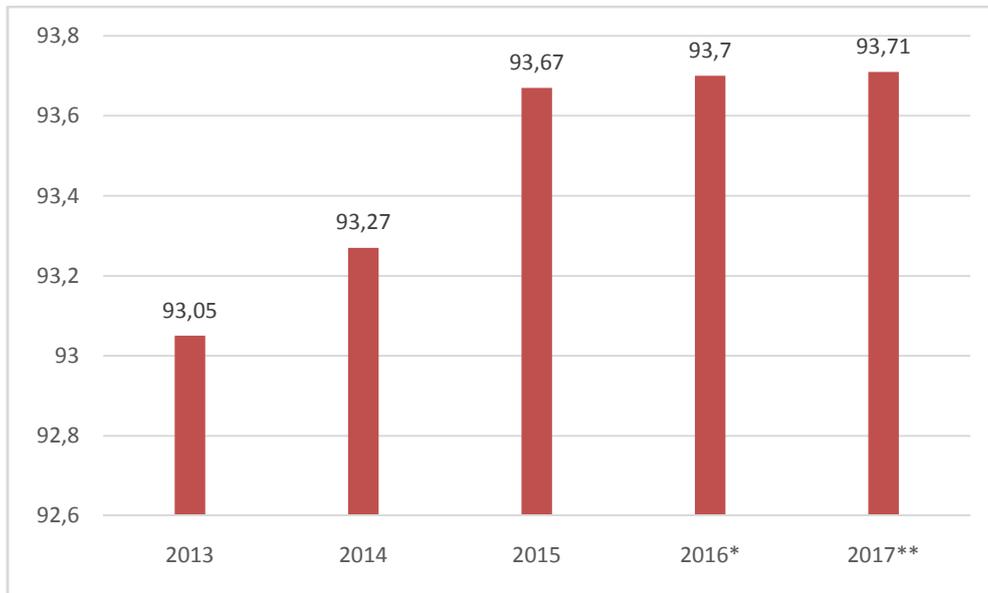
Tabel 3.14

Capaian kinerja Indikator Indeks Pembangunan Gender

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=3/2X100
2.2.4	Meningkatnya Keadilan Gender			
	2.2.4.1 Indeks Pembangunan Gender	93,93	93,71	99,76%

Pada tahun 2017, indeks pembangunan gender Kota Mojokerto adalah 93,71 capaian ini masih dibawah target kinerja yaitu 93.93.

Grafik3.12
Perkembangan IPG Kota Mojokerto 2013-2017



Sumber data : BPS Kota Mojokerto

* = data sementara

** = Data sangat sementara

Perkembangan indeks pembangunan gender di kota Mojokerto mengalami tren positif, bila dibandingkan dengan IPG provinsi Jawa Timur yang pada tahun 2016 masih 91,77.

2.2.4.2 Indikator : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) atau gender empowerment measurement (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran, bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk

berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan

IDG diukur berdasarkan 3 komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manager, administrasi dan teknisi serta sumbangan pendapatan.

Tabel 3.15
Komponen penyusun indeks pemberdayaan gender

Komponen	perempuan	Laki-laki
Proporsi penduduk	50,36%	49,64%
Keterwakilan diparlemen	28%	72%
Proporsi manager, staf adm, pekerja profesional, teknisi	41,45%	58,55%
Proporsi angkatan kerja (presentase penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi	39,95%	60,05%

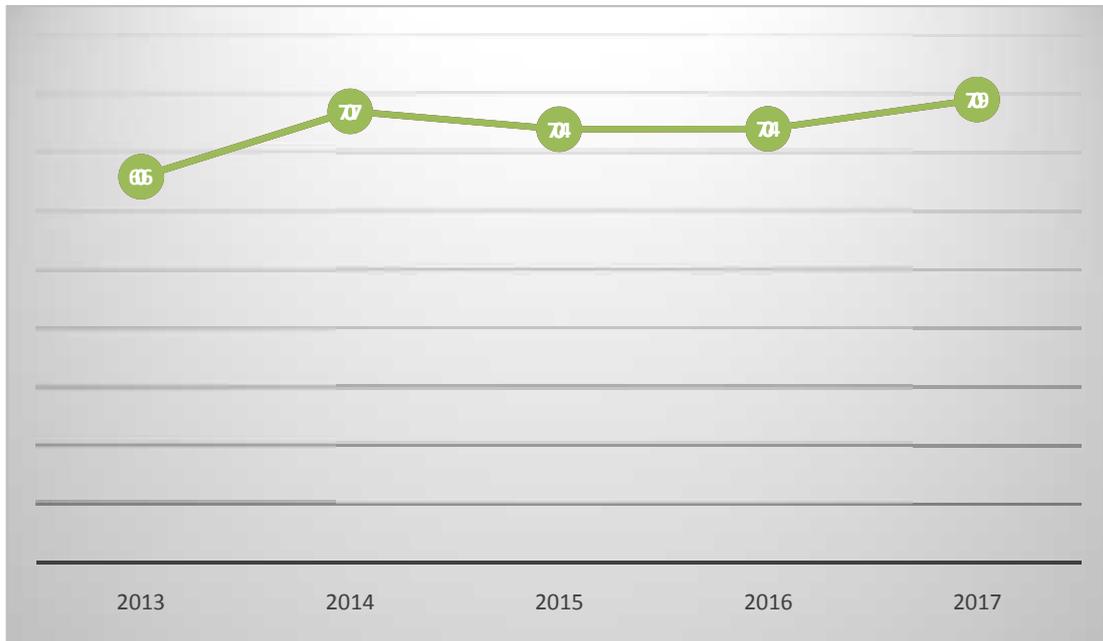
Sehingga indeks pemberdayaan gender kota Mojokerto tahun 2017 adalah 79 (tujuh puluh sembilan)

Tabel 3.16
Capaian kinerja Indikator Indeks Pemberdayaan Gender

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	(4)=3/2X100
2.2.4	Meningkatnya Keadilan Gender			
	2.2.4.1 Indeks Pemberdayaan Gender	84,65	79	93,32%

Keterwakilan perempuan dalam parlemen pada tahun 2017 meningkat karena ada 2 anggota DPRD yang merupakan anggota pergantian antar waktu (1 orang PAW dari PDIP dan 1 orang PAW dari PKB), sehingga yang semula anggota DPRD Kota Mojokerto yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang (2 orang dari PDIP, 1 orang dari P. Golkar, 1 Orang dari PKB, 1 orang dari PAN) menjadi 7 orang atau 28 %.

Grafik 3.13
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender 2013-2017



Misi-3 :3. Menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana yang baik dan memadai

3.1 Meningkatkan Kinerja Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Perkotaan dengan Sasaran Pembangunan

3.1.1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan

3.1.1.1 Persentase jalan kota dalam kondisi baik

Panjang jalan dalam kondisi baik adalah Jalan yang nilai RCI dan IRI sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator persentase jalan kota dalam kondisi baik :

$$\frac{\text{Jumlah panjang jalan kota kondisi baik}}{\text{Jumlah panjang jalan kota}} \times 100 \%$$

Panjang jalan keseluruhan di Kota Mojokerto adalah 137.919km yang terdiri dari kelas jalan II sebesar 12.190 km, kelas jalan IIIA sebesar 8.352 km, kelas jalan IIIB sebanyak 95.552 km dan kelas Jalan IIIC 21.825. Dilihat dari kualitas jalan dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.14
Kualitas Jalan tahun 2017



Realisasi indikator “Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik” sebesar 93.436 km atau mencapai 72.23% yang berarti dari target sebesar 72%. Bila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2016 sebesar 99.825 m atau mencapai 72.23% , maka panjang jalan kota yang baik ditahun 2017 ini sama dengan realisasi tahun sebelumnya. realisasi indikator yang mencapai 72.23% berarti juga melampaui Target RPJM sebesar 64 %, sebagaimana terlihat dari tabel berikut ini :

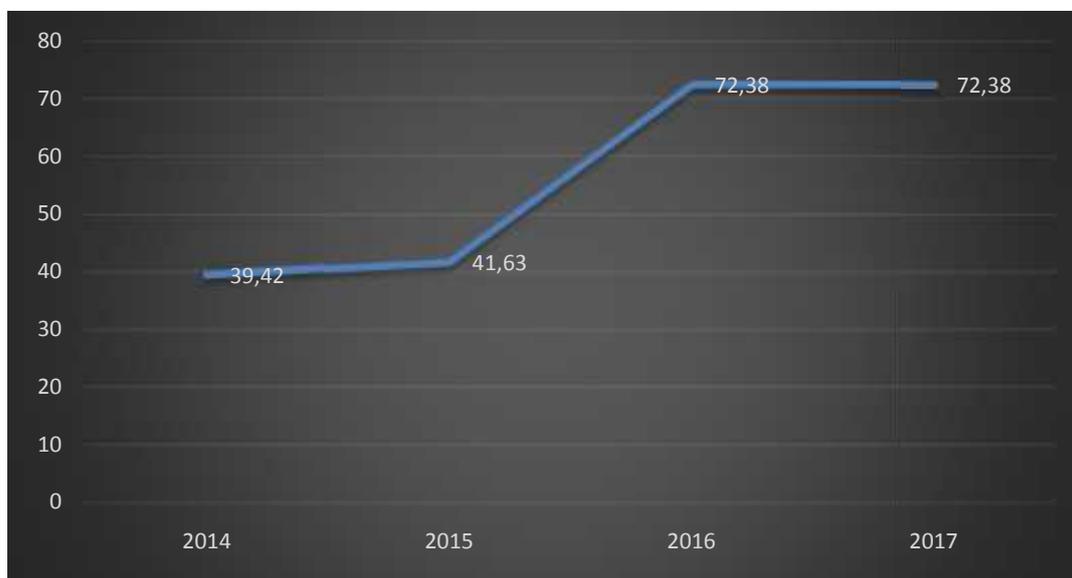
Tabel 3.17
Perbandingan Capaian indikator “Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik” dengan target RPJM

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target RPJM	2017		
			Target	Realisasi	Capaian
(1)					
3.1.1.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan				
	3.1.1.1 Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	64 %	72 %	72.38%	105 %

Realisasi kinerja indikator ini juga membaik dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.15

Realisasi kondisi jalan Kota dalam kondisi baik dari tahun 2014-2017



Capaian kinerja indikator jalan kota dalam kondisi baik yang sesuai target dikarenakan ada unit pemeliharaan rutin jalan yang cepat dan responsif untuk perbaikan jalan sedang, dan ada program pemeliharaan jalan lapis ulang/peningkatan jalan untuk jalan yang rusak dan rusak berat.

3.1.1.2 Persentase rumah sehat

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi yang baik, kepadatan hunian sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat dari tanah.

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator persentase rumah sehat :

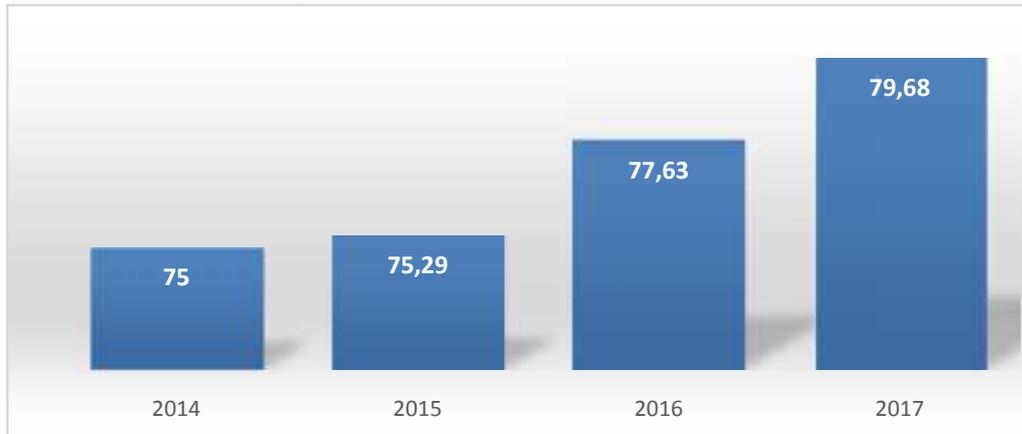
$$\frac{\text{Jumlah rumah sehat}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100 \%$$

Tabel 3.18
Capaian Indikator “Persentase Rumah Sehat”

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		TAHUN 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)		(2)	(3)	$4=3/2 \times 100$
3.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan			
	3.1.1.2 Persentase Rumah sehat	92,04 %	79,68 %	86,57%

Pada tahun 2017, jumlah rumah yang tergolong sehat sebanyak 27.112 rumah (79,68%) dari total rumah yang dibina dan diperiksa. Jumlah rumah sehat ini mengalami sedikit kenaikan pada rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, serta telah dibina dan diperiksa di tahun 2017 tercatat sebesar 79,68%. Realisasi rumah sehat yang hanya 79,68% menjadikan target kinerja dan target RPJM sebesar 92,04% tidak tercapai

Grafik 3.16
Persentase rumah sehat tahun 2014-2017



Walaupun Naiknya sedikit tapi dari tahun ke tahun, jumlah rumah sehat mengalami kenaikan. Untuk Mencapai kinerja sesuai dengan target perencanaan, maka Pemerintah Kota Mojokerto akan melaksanakan program

1. Anggaran satu RW 50 Juta yang dipergunakan untuk perbaikan lingkungan dengan program kasih setia termasuk membuat WC komunal dan lain sebagainya
2. Menggalakkan pola hidup bersih dengan tidak merokok di dalam rumah.

Misi-4 :4. Meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketentraman lingkungan

4.1. Menjadikan Kota Mojokerto Sebagai Daerah yang Aman, Tertib, dan Tentram dengan Sasaran Pembangunan meliputi:

4.1.1 Menurunnya Angka Gangguan Kantribmas dan Penegakan Perda

4.1.1.1 Persentase menurunnya pelanggaran KAMTIBMAS

Kejadian gangguan Kamtibmas pada tahun 2017 sebanyak 40 kejadian, dengan rincian sebagaimana dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.17
Jumlah gangguan kamtibmas



Sumber Data : Satpol PP

Kejadian gangguan kamtibmas yang menurun tajam adalah kasus narkoba dimana tahun 2016 ada 10 kejadian sedangkan pada tahun 2017 hanya ada 2 kejadian. Tetapi kasus narkoba adalah fenomena gunung es, dimana kasus yang diketahui/ditangani dalam kenyataannya bisa lebih besar apalagi persoalan narkoba sudah jadi persoalan yang serius, sehingga tetap diperlukan usaha-usaha yang untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Sementara kasus gangguan kamtibmas yang masih banyak adalah adalah kasus pencurian. Untuk menekan terjadinya kejadian pencurian maka perlu mengaktifkan sistem keamanan lingkungan. Di samping itu selain memasang cctv di setiap perempatan jalan, Pemerintah kota Mojokerto

mengkaji aturan kewajiban pemasangan CCTV di semua area public dan mewajibkan perusahaan untuk memasang CCTV

Tabel 3. 19
Capaian kinerja Persentase Menurunnya Gangguan Kamtibmas

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
4.1.3	Menurunnya Angka Gangguan Kamtibmas dan Penegakan Perda			
	4.1.3.1 Persentase menurunnya Gangguan KAMTIBMAS	7%	16,66 %	238%

Sumber data : Satpol PP

Gangguan kamtibmas pada tahun 2016 sebanyak 48 kejadian, sehingga dengan adanya 40 kejadian gangguan kamtibmas di tahun 2017, maka Indikator persentase menurunnya Gangguan kamtibmas ini realisasinya sebesar 16,66 %. Realiasi ini melebihi target tahun 2017 yaitu sebesar 7 %.

Tabel 3.20
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2014-2017 dengan target RPJM

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target RPJM	REALISASI			
			2014	2015	2016	2017
4.1.1.	Menurunnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma					
	4.1.3.1 Persentase menurunnya gangguan Kamtibmas	7%	10%	-36%	-220%	16,6%

Dibandingkan dengan tahun 2016 yang sampai -220% maka realisasi kinerja tahun 2017 jauh lebih baik. Walaupun secara umum ada kecenderungan adanya kenaikan gangguan kamtibmas, tetapi di tahun 2017 sudah mulai menunjukkan keadaan yang lebih baik bahkan realisasi menurunnya gangguan kamtibmas sudah melebihi target yang ada di RPJM sebesar 7%.

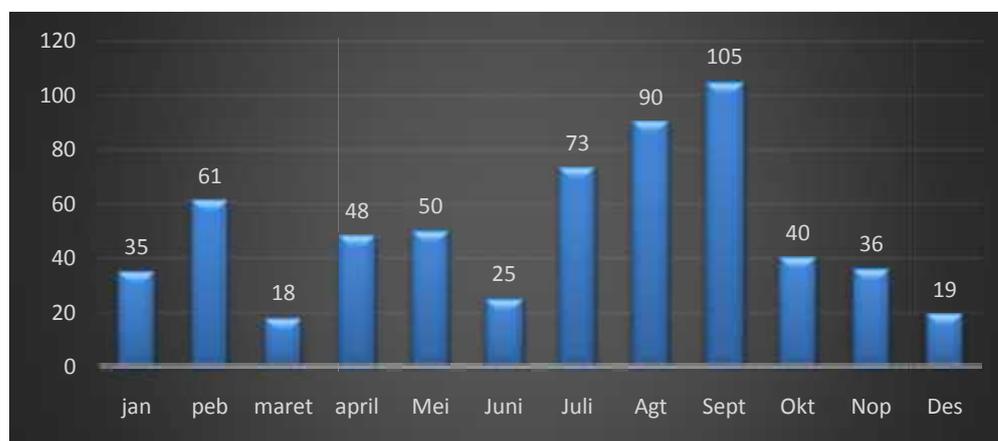
4.1.3.2 Persentase menurunnya pelanggaran PERDA

Menurut Wikipedia, Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota. Perda termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan

Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Perda juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Peraturan Daerah (perda) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Perda sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Jumlah Kejadian pelanggaran perda pada tahun 2017 tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik 3.18
Kejadian Pelanggaran Perda



Sumber Data : Satpol PP

Kejadian pelanggaran Perda di tahun 2017 sebanyak 660 kejadian, didominasi oleh pelanggaran Perda no. 3 tahun 2013 tentang ketertiban umum sebanyak 402 kejadian. Kemudian pelanggaran Perda No. 12 tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebanyak 172 kejadian, Pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame sebanyak 44 kejadian, pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebanyak 31 kejadian, dan Pelanggaran Perda No 9 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 11 kejadian

Tabel 3.21
Capaian kinerja Persentase Menurunnya Pelanggaran Perda

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
4.1.3	Menurunnya Angka Gangguan Kantribmas dan Penegakan Perda			
	4.1.3.2 Persentase Menurunnya pelanggaran Perda	19,06	70,37	369,20%

Pelanggaran perda di tahun 2017 ini mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu dari 2.228 kejadian di tahun 2016 menjadi hanya 660 kejadian pelanggaran Perda, Persentase Penurunan pelanggaran Perda pada tahun 2017 sangat tajam yaitu mencapai 70,37 %.

Tabel 3.22
Perbandingan realisasi tahun 2016 dengan target RPJM dan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		Target RPJM	REALISASI			
			2014	2015	2016	2017
4.1.1.	Menurunnya angka kriminalitas dan pelanggaran hukum/peraturan/norma					
	4.1.3.2 Persentase menurunnya pelanggaran PERDA	19,06%	10%	21,39%	15.08 %	70,37%

Dilihat dari data yang ada, maka kinerja indikator persentasi menurunnya pelanggaran Perda dari tahun ke tahun semakin baik. Mengalami penurunan hanya pada tahun 2016. Realisasi kinerja indikator ini juga lebih baik bila dibandingkan dengan target yang ada di RPJM sebesar 19,06 %.

Untuk meningkatkan kinerja dalam rangka penurunan pelanggaran Perda ini, telah dilakukan program dan kegiatan antara lain :

1. Penambahan personil bantuan Polisi Pamong Praja sebanyak 100 personil;
2. Upaya sosialisasi penyadaran masyarakat ;
3. Melaksanakan penertiban secara rutin dan berkala.

4.1.2 Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

4.1.2.1 Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Dalam hal ini yang dikategorikan sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai Kota Layak Anak (KLA) apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA yang meliputi :

- a. penguatan kelembagaan; dan
- b. klaster hak anak;

Ada 5 kategori peringkat penghargaan KLA yaitu :

1. Kota Layak Anak
2. Utama
3. Nindya
4. Madya
5. Pratama

Tabel 3.23

Capaian kinerja Persentase Kota Layak Anak

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
4.1.2	Meningkatnya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak			
	4.1.2.1 Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	100%

Tahun 2017, Kota Mojokerto mendapat penghargaan sebagai kota layak anak dengan peringkat pratama. Dibandingkan dengan daerah kabupaten lain, maka Kota Mojokerto masih harus terus bekerja keras untuk mencapai peringkat yang lebih baik seperti Kota Malang yang memperoleh Predikat

madya atau Kota Surabaya yang tahun 2017 bahkan sudah memperoleh predikat utama

4.1.3 Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas

4.1.3.1 Angka kecelakaan lalu lintas

Angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2017 sebanyak 89 kejadian, dan terbagi dalam 2 jenis kecelakaan yaitu :

1. kecelakaan yang melibatkan anak sekolah pada jam sekolah sebanyak 4 kejadian
2. kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengendara sebanyak 85 kejadian

Sedangkan kecelakaan yang disebabkan ketidaklaikan angkutan umum dan kecelakaan yang disebabkan tidak berfungsinya fasilitas perlengkapan jalan pada tahun 2017 nihil.

Tabel 3.24

Perbandingan Capaian indikator “angka kecelakaan lalu lintas”

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		2017		
		Target	Realisasi	Capaian
(1)				
4.1.1.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas			
	4.1.1.1 Angka Kecelakaan Lalu Lintas	110	89	123,59 %

Realisasi kinerja indikator angka kecelakaan lalu lintas ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 110 kejadian.

Tabel 3.25

Perbandingan Realisasi dengan target RPJM dan Realisasi Tahun Sebelumnya

SASARAN/INDIKATOR		TARGET RPJM	Realisasi	
			2016	2017
4.1.1.	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas			
	4.1.1.1 Angka Kecelakaan Lalu Lintas	120	105	89

Dari Data Dinas Perhubungan, angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar ditahun 2017 menurun drastis yaitu dari 22 (dua Puluh dua) kejadian di tahun 2016 menjadi 4 (empat) kejadian di tahun 2017 atau mengalami

penurunan sebesar 82 %. Tetapi untuk kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengendara justru mengalami kenaikan sebesar 2% dari 83 (delapan puluh tiga)kejadian di tahun 2016 menjadi 85 (delapan puluh lima) kejadian di tahun 2017

Penurunan angka kecelakaan lalu lintas ini perlu diapresiasi karena angka kecelakaan lalu lintas itu tidak bisa diprediksi dan sulit unntuk dikendalikan. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja seperti yang diharapkan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi dan penertiban gabungan secara berkala bersama Kepolisian resort Mojokerto kota.
2. Memperbanyak trayek angkutan pelajar gratis
3. Memperbaiki berbagai sarana prasarana lalu lintas
4. Berkala

4.2 Menjadikan Kota Mojokerto Sebagai Daerah yang Nyaman dengan Sasaran Pembangunan meliputi:

4.2.1 Meningkatnya Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Sehat

4.2.2.1 Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan kemudahan dan keseragaman informasi kualitas udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu serta bahan pertimbangan dalam upaya-upaya menjaga kualitas udara

Parameter yang digunakan meliputi :

1. partikulat (PM10)
2. karbondioksida (CO)
3. Sulfur Dioksida (SO2)
4. Nitrogen dioksida (NO2)
5. Ozon (O3)

Tabel 3.26
Indeks Kualitas Udara

Kategori	Rentang	Penjelasan
1	2	3

Kategori	Rentang	Penjelasan
Baik	0-50	Tingkat Kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika
Sedang	51-100	Tingkat kualitas yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan sensitif dan nilai estetika
Tidak Sehat	101-199	Tingkat kualitas udara yang bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan atau nilai estetika
Sangat Tidak Sehat	200-299	Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar
Berbahaya	300-lebih	Tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi

Dari hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, kualitas udara menunjukkan nilai 55,55 yang mempunyai arti bahwa kualitas udara tidak berpengaruh pada kesehatan manusia maupun hewan secara umum tetapi berpengaruh kepada kelompok sensitif seperti anak-anak, orang tua dan orang dengan penyakit jantung.

Tabel 3.27

Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara

SASARAN/INDIKATOR	Tahun 2017		
	Target	Realisasi	Capaian

4.2.1	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Sehat				
	4.2.2.1	Indeks Kualitas Udara	51,25	55,55	92,22%

Tidak tercapainya target kinerja lebih banyak dipengaruhi oleh semakin banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi di Kota Mojokerto. Untuk itu pemerintah Kota telah melakukan beberapa program antara lain :

1. menambah Penanaman pohon baik yang ada di pinggir jalan
2. memperbanyak taman-taman dan hutan kota
3. ikut menyukseskan program kendaraan umur gratis bagi pelajar

4.2.2.2 Indeks Kualitas Air

Air, terutama air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2007 sekitar 3 persen rumah tangga di Indonesia menjadikan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu air sungai juga menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik. Di lain pihak sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Selain kualitasnya, sebenarnya ketersediaan air sungai (debit air) juga perlu dijadikan indikator. Namun karena data yang tidak tersedia, maka debit air untuk sementara tidak dimasukkan sebagai indikator.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran

Status Mutu Air (Metode Storet) Diklasifikasikan dalam 4 kelas :

- kelas A = baik sekali/memenuhi baku mutu, skor 0;
- kelas B = baik/tercemar ringan, skor -1 sampai -10;
- kelas C = sedang/tercemar sedang, skor -11 sampai dengan -30;
- kelas D = buruk/tercemar berat, skor -31.

Tabel 3.28
Capaian Indikator Indeks Kualitas Air

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
4.2.1	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Sehat			
	4.2.2.2 Indeks Kualitas Air	30	54,17	55,38

Pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengujian pada 22 titik yang telah ditentukan menurut ketentuan yang ada dengan 3 kali masa pengambilan sampel sepanjang tahun 2017. Dari hasil pengujian tersebut didapat kualitas air sebesar 54,17. Sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas air kita sangat buruk. Sehingga target 30 tidak berhasil dicapai. Hal tersebut banyak disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih kurang. Masih banyak warga masyarakat yang membuang hasil kegiatan rumah tangga ke aliran sungai-sungai yang melintasi kota Mojokerto. Disamping itu kota Mojokerto hanya dilewati oleh aliran sungai yang melintasi beberapa kabupaten/kota, maka perlu sinergi dengan beberapa kabupaten/kota yang dialiri oleh sungai yang sama.

4.2.2.3 Adipura

Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup kriteria Adipura terdiri dari 2 indikator pokok, yaitu:

1. Indikator kondisi fisik lingkungan perkotaan dalam hal kebersihan dan keteduhan kota
2. Indikator pengelolaan lingkungan perkotaan (non-fisik), yang meliputi institusi, manajemen, dan daya tanggap

Adipura dibagi menjadi lima katagori baru, yakni.

1. Adipura Buana, Diberikan kepada pemerintah daerah yang menggabungkan unsur sosial dengan lingkungan untuk membentuk

kota yang layak huni yang tercermin dari masyarakat kota yang peduli lingkungan.

2. Adipura Kirana, Penilaiannya dititikberatkan pada kota yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui trade, tourism and investmen yang berbasis pengelolaan lingkungan hidup
3. Adipura Karya, Menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk membentuk produktif city ct. Penciptaan lapangan kerja, pendidikan kesehatan, transportasi masal ramah lingkungan dan jaringan kerjasama antar daerah.
4. Adipura Bhakti, Menganugerahkan Walikota/Bupati terbaik yang Progresif, Kolaboratif dan Kreatif.
5. Adipura Paripurna, Merupakan penghargaan bagi kota/kabupaten dengan capaian minimal dua kategori dari beberapa kategori.

Tabel 3.29
Capaian Indikator Adipura

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
4.2.1	Meningkatnya Lingkungan yang Bersih, Nyaman, dan Sehat			
	4.2.2.3 Adipura	Kirana	Kirana	100%

Capaian kinerja ini di dapat dengan penilaian yang obyektif dan dengan standar yang terukur yang ditetapkan oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perolehan adipura ini sama dengan tahun 2016 yang juga mendapat adipura Kirana.

Banyak upaya dan terobosan yang dilakukan agar kota tetap bersih dan pengelolaan lingkungan perkotaan menjadi lebih baik antara lain ;

1. Adanya program kasih setia (kampung bersih, sehat, teduh, indah, dan aman,
2. Menjadikan kawasan TPA randegan sebagai kawasan wisata edukasi, merubah dari kawasan yang kumuh menjadi kawasan atau tempat rekreasi alternatif dan kawasan edukasi pengenalan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Misi-5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government)

5.1.1 Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel

5.1.1.1 Indikator :.Opini BPK atas laporan keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni :

1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)
2. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion)
3. Tidak wajar (adversed opinion)
4. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion)

Tabel 3.30

Capaian Indikator Opini BPK Atas Laporan keuangan Daerah

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
5.1.1	Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel			
	5.1.1.1 Opini BPK atas Laporan keuangan Daerah	WTP	WTP	100%

Laporan hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2016 Nomor 69.A/LHP/XVIII.SBY/05/2017 tanggal 30 Mei 2017, dinyatakan bahwa Laporan Keuangan pemerintah Kota Mojokerto dinyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP). Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) berarti laporan keuangan Pemerintah Kota Mojokerto dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor

meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 3.31
Perbandingan Realisasi dengan target RPJM dan Realisasi Tahun Sebelumnya

SASARAN/INDIKATOR		TARGET RPJM	REALISASI				
			2013	2014	2015	2016	2015
5.1.1	Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel						
	5.1.1.1 Opini BPK atas Laporan keuangan Daerah	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Kinerja indikator opini BPK atas laporan keuangan Daerah ini dari tahun ke tahun mengalami tren yang bagus karena opini WTP bisa diraih kecuali tahun 2014 dimana Pemerintah Kota Mojokerto mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Opini WTP ini juga mendukung target nasional sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Untuk terus memperbaiki kinerja dibidang keuangan daerah, maka telah dilakukan berbagai program antara lain :

1. Sistem penerimaan dan pembayaran non tunai dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Mojokerto
2. Memperbaiki sistem pengelolaan aset daerah

5.1.1.2 Nilai SAKIP

Sesuai dengan Surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor : tanggal 15 Januari 2018 perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2017, Nilai Sakip Kota Mojokerto tahun 2017 adalah 60,97, dengan predikat B. Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan

untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan. Pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah kota Mojokerto sudah mulai jalan walau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Realisasi target indikator kinerja utama “nilai Sakip” belum memenuhi target yang ada dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana terlihat pada table berikut ini :

Tabel 3.32
Capaian Indikator Nilai Sakip

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
5.1.1	Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel			
	5.1.1.2 Nilai SAKIP	BB	B	75 %

Realisasi indikator kinerja utama “ Nilai Sakip” di tahun 2017 ini jika dilihat dari nilai nya mengalami kenaikan 0.76 point dari 60.21 menjadi 60.97 tetapi bila dilihat dari tingkat akuntabilitas kinerjanya sama dengan tahun 2016 yaitu B. Realisasi indikator nilai sakip di tahun 2017 belum sesuai dengan target yaitu BB. Demikian juga bila dibandingkan dengan target yang ada di RPJM juga belum memenuhi target sebagaimana dapat diketahui dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi dengan target RPJM dan Realisasi Tahun Sebelumnya

SASARAN/INDIKATOR		TARGET RPJM	REALISASI				
			2013	2014	2015	2016	2017
5.1.1	Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel						
	5.1.1.2 Nilai SAKIP	BB	C	C	CC	B	B

Perolehan target B ini mendukung pencapaian target nasional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dimana pada tahun 2019 kabupaten kota yang nilai sakipnya B ditargetkan 50%. Walau adanya tren kenaikan nilai

sakip, tetapi kondisi SAKIP yang bagus ini harus terus ditingkatkan, sebab bila dibandingkan dengan propinsi Jawa Timur yang nilai SAKIP nya adalah A atau Kabupaten Banyuwangi yang sudah memperoleh nilai SAKIP A serta kabupaten/kota yang lain di Jawa Timur juga sudah banyak yang mendapatkan nilai BB seperti Kota Malang, Kab Bondowoso dan lainnya, kota Mojokerto masih jauh tertinggal. Untuk itu Pemerintah Kota Mojokerto di tahun 2018 telah melakukan perbaikan sistem akuntabilitas kinerja nya antara lain :

1. Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah yang disetujui oleh DPRD Kota Mojokerto pada tanggal 23 Januari 2018. Perubahan RPJM ini mengacu hasil Pra evaluasi sakip dimana terdapat perubahan yang besar berupa penambahan satu misi yaitu misi ke 5 Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih (Clean Government). Selain menambah misi juga melengkapi dengan indikator tujuan dan merubah sasaran serta indikator sasaran.
2. Mulai Tahun 2018, Pemerintah Kota Mojokerto mulai melaksanakan tambahan penghasilan yang berbasis kinerja.

5.1.1.3 Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara Pelayanan Publik, nilai persepsi , mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan adalah sebagai mana dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.34

Nilai Persepsi, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja Unit pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit pelayanan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik

4	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
---	----------------	---	-------------

Sehingga yang dinamakan penilaian SKM dengan nilai baik adalah Survey Kepuasan Masyarakat yang nilainya interval konversinya mulai dari 76,61.

Pada Tahun 2017, dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan, perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan survey kepuasan masyarakat dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.35

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah dan Unit Kerja

No	NAMA SKPD	NILAI SKM
1	2	3
1.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	78,31
2.	Kecamatan Prajurit Kulon	
	a. Kelurahan Surodinawan	84,6
	b. Kelurahan Pulorejo	83,6
	c. Kelurahan Kauman	86,6
3.	Kecamatan Magersari	
	a. Kelurahan Magersari	89,8
	b. Kelurahan Wates	80,4
	c. Kelurahan Balongsari	80,4
	d. Kelurahan Gedongan	70,8
	e. Kelurahan Kedundung	80,4
	f. Kelurahan gunung Gedangan	78,7
4.	Kecamatan Kranggan	
	a. Kelurahan Kranggan	70,4
	b. Kelurahan Miji	70,8
	c. Kelurahan Meri	75,9
	d. Kelurahan Jagalan	79,6
	e. Kelurahan Purwotengah	87,5
	f. Kelurahan Gunung Gedangan	78,7
5.	Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	81,52
6.	Dinas Kesehatan	
	UPT Puskesmas Kedundung	84,86
	UPT Puskesmas Gedongan	83,29
	UPT Puskesmas Wates	83,19
	UPT Puskesmas Mentikan	84,02
	UPT Puskesmas blooto	80,44
7.	RSUD (rawat Inap)	74,01
8.	Dinas Pendidikan	81.17
9.	Badan Kepegawaian	87,29

No	NAMA SKPD	NILAI SKM
10.	Kantor Satpol PP	77.17
11.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	79,75
12.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	80,40
13.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	79.11
	Nilai rata-rata	80,44

Pengukuran Capaian Kinerja Indikator nilai rata-rata SKM PD :

$$\frac{\text{Jumlah keseluruhan nilai SKM}}{\text{Jumlah unit pelayanan/PD}} \times 100 \%$$

Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah dan unit kerja pada tahun 2017 adalah 80.44. nilai rata-rata SKM ini bila dilihat dari mutu pelayanan maka nilainya B. Capaian kinerja indikator nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM) Perangkat Daerah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 3.36

Capaian Kinerja Indikator nilai rata-rata SKM perangkat Daerah

SASARAN/INDIKATOR		Tahun 2017		
		Target	Realisasi	Capaian
5.1.1	Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel			
	5.1.1.3 Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) unit	79,68	80.44	109.17%

Bila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 79.68 maka indikator nilai rata-rata survey kepuasan masyarakat (SKM) perangkat Daerah Capaian kinerjanya telah memenuhi target kinerja yaitu sebesar 109.17%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 dimana rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) Perangkat Daerah mencapai 80.32%, maka capaian kinerja indikator ini pada tahun 2017 mengalami kenaikan 0,12%. Dan Perbandingan Capaian kinerja Nilai Rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dan target RPJM dapat dilihat pada tabel berikut Ini :

Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi dengan target RPJM dan Realisasi Tahun
Sebelumnya

SASARAN/INDIKATOR		TARGET RPJM	REALISASI		
			2015	2016	2017
5.1.1	Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Akuntabel				
	5.1.1.3 Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	79.68	66.07	80.32	80.44

Realisasi indikator Nilai rata-rata Survey kepuasan Masyarakat (SKM) perangkat Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bila di bandingkan dengan target yang ada di RPJM, realisasi kinerja tahun 2017 ini juga melebihi target di RPJM sebesar 0.76 point.

Nilai SKM memang bervariasi dan untuk kategori kurang baik, kebanyakan berasal dari kelurahan dan RSUD. Itu artinya pelayanan di beberapa kelurahan dan di RSUD belum sesuai dengan harapan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan perbaikan pelayanan terutama pembinaan terhadap sumber daya manusianya agar bisa melayani dengan baik.

B	REALISASI ANGGARAN
----------	---------------------------

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran, yang realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.38
REALISASI ANGGARAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	program pendidikan anak usia dini	2.259.849.700	1.036.598.030	
		program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	43.499.546.200	27.695.810.403	
		program pendidikan non formal	994.000.000	293.925.000	
		program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1.680.990.000	435.889.100	
		program manajemen pelayanan pendidikan	2.935.398.000	1.028.204.300	
		program pengelolaan kekayaan seni dan budaya	292.100.000	186.336.100	
		program pengelolaan keragaman seni dan budaya	100.000.000	93.642.000	
		program peningkatan pendidikab generasi muda	45.000.000	31.718.250	
		program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1.511.330.600	1.394.991.688	
		program peningkatan kualitas pelayanan informasi	105.000.000	95.065.000	
		program peningkatan pelayanan angkutan	3.251.451.500	3.047.839.024	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		TOTAL	56.674.666.000	35.340.018.895	62,36%
2	meningkatnya derajat kesehatan	program obat dan perbekalan kesehatan	2.028.738.800	1.877.966.641	
		program upaya kesehatan masyarakat	2.542.914.550	2.425.926.150	
		program pengawasan obat dan makanan	96.395.500	84.424.900	
		program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	576.360.600	481.812.600	
		program perbaikan gizi masyarakat	1.046.550.700	537.179.450	
		program pengembangan lingkungan sehat	624.189.400	537.179.450	
		program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	3.813.990.750	3.514.246.110	
		program standarisasi pelayanan kesehatan	870.126.650	566.353.146	
		program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	11.326.122.750	8.032.316.691	
		program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	413.184.000	314.184.000	
		program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	204.362.000	160.937.000	
		program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	71.929.350	65.606.300	
		program upaya kesehatan perorangan	1.024.130.000	968.024.350	
		program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan	1.049.804.000	872.770.675	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		program pengelolaan/penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan	20.691.996.500	20.162.869.671	
		program peningkatan kesehatan ibu dan anak	1.426.792.000	1.061.308.000	
		program peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan	117.088.081.000	12.501.816.628	
		program pembinaan lingkungan sosial	11.809.662.500	9.970.309.674	
		program pengadaan peningkatan sarana dan prasana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru	10.743.653.500	10.616.227.798	
		program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan	1.049.804.000	872.770.675	
		program keluarga berencana	861.525.500	792.407.314	
		program kesehatan reproduksi remaja	197.233.900	190.823.900	
		program pelayanan kotnrasepsi	323.870.000	311.716.800	
		program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	250.000.000	249.250.000	
		program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	211.501.300	203.183.450	
		program penyiapan tenaga pendamping kolompok bina keluarga	206.800.000	202.463.500	
		program pengembangan model operasional BKB - Posyandu-PADU	24.848.500	24.841.500	
		TOTAL	90.574.567.750	77.598.916.373	40,72%

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
3	meningkatnya PDRB per lapangan usaha potensial	program pengembangan dan pengendalian ketahanan pangan	921.730.000	614.299.118	
		program rehabilitasi hutan dan lahan	182.829.000	180.999.000	
		program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)	565.226.000	557.395.500	
		program peningkatan kesejahteraan petani	364.335.000	340.523.000	
		program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	44.740.000	44.240.000	
		program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	454.639.000	391.944.000	
		program pengembangan budidaya perikanan	522.404.000	493.809.000	
		program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	212.098.750	208.298.750	
		program peningkatan produksi peternakan	69.235.000	67.335.000	
		program peningkatan produksi hasil peternakan	135.783.000	127.533.000	
		program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	117.596.300	112.516.800	
		program pengembangan industry kecil dan menengah yang kondusif	495.194.000	470.858.700	
		program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	858.885.000	855.201.802	
		program peningkatan dan pengembangan ekspor	68.512.150	68.347.550	
		program peningkatan			

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		kemampuan teknologi industri	300.000.000	284.481.400	
		program penataan struktur industri	150.000.000	147.262.250	
		program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	677.001.600	662.051.150	
		program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	590.766.100	570.859.600	
		program pengembangan sentra-sentra industri potensial	4.389.241.000	2.881.449.886	
		TOTAL	11.120.215.900	9.079.405.506	81,65%
4	meningkatnya investasi penanaman modal	program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	4.796.449.150	4.719.213.084	
		program pembinaan dan pengembangan pelayanan investasi	734.572.000	641.063.003	
		TOTAL	5.531.021.150	5.360.276.087	96,91%
5	Menurunnya kemiskinan	program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terkecil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1.658.475.000	1.576.041.750	
		program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan	733.374.800	697.610.300	
		program peningkatan pembinaan dan pelayanan masalah sosial	462.384.500	378.873.250	
		program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	376.225.000	242.893.750	
		program pembinaan panti asuhan/panti jompo	754.529.000	612.223.000	
		program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, psk, narkoba)	46.256.000	41.095.000	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		dan penyakit)			
		program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	1.155.118.000	995.537.100	
		TOTAL	5.186.362.300	4.544.274.150	87,62%
6	Menurunnya tingkat penangguran	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	1.040.547.100	1.012.167.348	
		Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	401.290.000	388.897.500	
		Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	100.000.000	97.178.000	
		program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	858.885.000	855.201.802	
		program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	963.320.000	946.003.500	
		program peningkatan kesempatan kerja	602.839.700	587.024.300	
		program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	292.000.000	249.911.500	
		program pengembangan wilayah transmigrasi	236.800.000	180.547.000	
		TOTAL	4.495.681.800	4.316.930.950	96,02%
7	meningkatnya keadilan gender	program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	149.040.000	140.707.650	
		program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	253.961.900	250.099.400	
		program penguatan kelembagaan	827.202.450	811.637.300	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		pengarusutamaan gender dan anak			
		program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	87.900.000	87.900.000	
		program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	992.548.150	932.917.650	
		program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	176.831.400	88.974.850	
		TOTAL	2.487.483.900	2.312.236.850	92,95%
8	meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasana perkotaan	program pembangunan jalan dan jembatan	8.708.900.300	6.327.415.181	
		program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	12.858.818.300	10.223.827.162	
		program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	431.053.000	311.454.600	
		program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	2.819.651.000	2.031.236.909	
		program pengendalian banjir	3.407.800.000	2.222.930.568	
		program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	37.000.000.000	27.485.620.950	
		program pembangunan infrastruktur perdesaan	2.294.340.500	1.008.316.400	
		program perencanaan pengembangan perumahan dan permukiman	250.000.000	226.725.045	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		penyelesaian konflik-konflik pertanahan	56.840.000	54.143.809	
		program pengembangan perumahan	2.000.000.000	1.766.118.444	
		program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	7.391.300.000	5.084.451.643	
		TOTAL	77.218.703.100	56.742.240.711	73,48%
9	menurunnya angka gangguan KAMTIBNAS dan pelanggaran peraturan daerah	program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	2.972.700.000	2.971.500.000	
		program pemeliharaan kantibnas dan pencegahan tindakan kriminal	2.092.872.000	2.049.621.000	
		program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	592.500.000	588.700.000	
		TOTAL	5.658.072.000	5.609.821.000	99,15%
10	menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1.182.250.000	1.175.663.618	
		program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	842.016.400	822.114.560	
		program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	845.200.000	835.208.400	
		TOTAL	2.869.466.400	2.832.986.578	98,73%
11	meningkatnya lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat	program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	4.215.063.000	3.870.132.975	
		program pengelolaan ruang terbuka hijau	5.794.602.000	5.622.509.050	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	62.235.000	61.235.250	
		program peningkatan dan pengembangan lampu penerangan jalan	4.483.080.100	1.996.342.594	
		program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	429.950.000	407.977.300	
		program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	429.950.000	407.977.300	
		program peningkatan pengendalian polusi	169.099.000	143.391.500	
		program pembinaan dan pengembangan pelayanan wilayah kecamatan	16.294.615.250	13.482.387.474	
		TOTAL	31.878.594.350	25.991.953.443	81,53%
12	Birokrasi yang bersih, melayani dan akuntabel	program pengendalian dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	9.628.307.750	8.665.233.974	
		program peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.808.603.300	2.586.434.097	
		program pelayanan administrasi perkantoran	79.080.587.900	71.684.443.195	
		program peningkatan sarana dan prasana aparatur	40.551.930.750	23.789.139.529	
		program peningkatan disiplin aparatur	1.609.020.950	1.480.091.118	
		program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	1.812.914.650	1.495.392.650	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	793.140.000	777.389.309	
		Porgram perencanaan pembangunan daerah	1.875.542.750	1.843.114.650	
		program perencanaan pembangunan ekonomi	508.840.100	483.605.850	
		program perencanaan sosial dan budaya	890.491.700	839.666.323	
		porgram perencanaan tata ruang	495.593.750	492.172.154	
		program penelitian dan pengembangan pembangunan	1.498.145.000	1.429.002.000	
		program pembinaan dan pengembangan aparatur	2.809.230.700	2.521.481.768	
		program pengembangan data/informasi	1.415.961.100	1.349.628.766	
		program pencegahan korupsi	78.070.900	74.967.650	
		program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan	169.011.950	152.826.400	
		program sosialisasi ketentuan dibidang cukai	310.000.000	252.610.000	
		program pembinaan dan pengembangan bidang energi dan sumber daya mineral	461.763.500	431.774.500	
		program pembinaan dan pengembangan sarana perekonomian	1.075.318.500	1.026.004.816	
		program penataan	.501.323.400	.335.997.817	

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
		peraturan perundang-undangan			
		program penataan daerah otonomi	305.462.650	288.000.950	
		program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	626.118.150	562.967.071	
		program pengembangan pemasaran pariwisata	1.677.445.100	1.596.041.600	
		program perbaikan sistem administrasi kearsipan	164.160.000	151.288.000	
		program penyelamatan dan pelastarian dokumen/arsip daerah	187.500.000	185.264.930	
		TOTAL	52.334.484.550	25.494.539.117	48,72%

C	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
----------	--

Untuk mengetahui apakah capaian anggaran sudah efisien, maka perlu dibandingkan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran, sebagai berikut :

Tabel 3.39
Perbandingan capaian kinerja dan anggaran tahun 2017

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN EFISIEN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan	99,55%	62,36%	156,63 %
2	Meningkatnya derajat kesehatan	123,33%	40,72%	302,87 %
3	Meningkatnya PDRB per lapangan usaha potensial	96,58 %	81,65%	118,28 %
4	Meningkatnya investasi Penanaman Modal	-133,63 %	96,91%	-137,89 %
5	Menurunnya kemiskinan	82,83 %	87,62%	94,53 %
6	Menurunnya Tingkat Pengangguran	102,35%	96,02%	106,59 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN EFISIEN
7	Meningkatnya keadilan gender	96,24	92,95%	103,54 %
8	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan	95,78%	73,48%	130,35 %
9	Menurunnya angka gangguan KAMTIBMAS dan pelanggaran Peraturan Daerah	303,5%	99,15%	306.10 %
10	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak	100%	99,15%	100,86 %
11	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	123,59%	98,73%	125,18 %
12	Meningkatnya lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat	82,53%	81,53%	101,23 %
13	Birokrasi yang bersih, melayani dan akuntabel	94,72%	82,38%	114,98 %

Anggaran yang efisien adalah jika capaian kinerjanya lebih besar dari capaian anggarannya, Sehingga dari kedua belas sasaran strategis, ada 2 sasaran yang belum efisien yaitu Meningkatkan investasi Penanaman Modal dan Menurunnya kemiskinan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Mojokerto disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah *Kota Mojokerto berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2017 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun kedepannya..*

Berdasarkan uraian Capaian Kinerja Sasaran pada Bab III, Ada beberapa indikator kinerja yang belum optimal kinerjanya karena realisasi kinerjanya kurang dari target yang sudah ditetapkan, antara lain :

1. Angka Rata-rata lama sekolah
2. Angka harapan lama sekolah
3. Kontribusi PDRB Pertanian dan Perikanan
4. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
5. Pertumbuhan Investasi penanaman modal
6. Angka Kemiskinan
7. Tingkat pengangguran terbuka
8. Indeks Pemberdayaan Gender
9. Presentasi Rumah sehat
10. Indeks Kualitas udara
11. Indeks Kualitas air
12. Nilai Sakip

B. UPAYA PERBAIKAN

Adapun upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya untuk memberikan bantuan kepada anak didik yang bersekolah tingkat pendidikan menengah baik itu SMA atau SMK.
2. Memberikan beasiswa dan biaya hidup bagi mahasiswa miskin yang diterima di perguruan tinggi negeri ;
3. Mengembangkan Pertanian perkotaan ;
4. Menyempurnakan sistem pelayanan perijinan ;
5. Menyelenggarakan mal pelayanan publik yang akan mempermudah orang mendapat pelayanan perijinan dan non perijinan ;
6. Mengembangkan penanganan terpadu penanggulangan kemiskinan ;
7. Menggunakan perangkat Teknologi Informasi dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur terutama di Unit Pelayanan Masyarakat
8. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kota dilakukan forum diskusi SKPD untuk mengintegrasikan berbagai masukan ke dalam kegiatan dan anggaran masing-masing SKPD termasuk menggunakan aplikasi pengaduan berbasis teknologi informasi .
9. Bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dilakukan dengan mengintegrasikan setiap program/kegiatan dengan yang lain, seperti Gerakan PSN yang selama ini hanya memantau jentik nyamuk, maka di tahun ini dan selanjutnya, kegiatan PSN juga dibarengi dengan kegiatan penyuluhan kesehatan dan mendata keadaan infrastuktur.
10. Di Kota Mojokerto Kurangnya Ruang Terbuka hijau terutama ruang terbuka hijau publik, untuk itu harus dilakukan penambahan ruang terbuka hijau dengan menambah taman-taman kota, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau juga sebagai sarana rekreasi warga kota

11. Untuk menumbuhkan perekonomian di wilayah barat maka akan dibangun jalan lingkar barat

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Mojokerto yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Misi pada Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian Visi Kota Mojokerto yaitu sehat, cerdas, sejahtera dan bermoral.

Mojokerto, Maret 2017

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAS'UD YUNUS**

Jabatan : Walikota Mojokerto

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mojokerto, 31 Oktober 2017

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2017

KOTA MOJOKERTO

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN			TARGET
			2
1.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan		
	1.1.1.1	Rata-rata nilai UN SD/MI	79,10
	1.1.1.2	Rata-rata nilai UN SMP/MTs	52,78
	1.1.1.3	Angka rata-rata lama sekolah	10,16
	1.1.1.4	Angka harapan lama sekolah	14,27
1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan		
	1.1.2.1	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH	87,46
	1.1.2.2	Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 KH	4,56
	1.1.2.3	Prevalensi balita gizi buruk	0,45
2.1.1	Meningkatnya PDRB per lapangan usaha potensial		
	2.1.1.1	Kontribusi PDRB Pertanian dan perikanan	0,75
	2.1.1.2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	11,42
	2.1.1.3	Kontribusi PDRB Penyediaan akomodasi dan makan	6,72
2.1.2	. Meningkatkan investasi Penanaman Modal		
	2.1.2.1	Pertumbuhan Investasi Penanaman Modal	22
2.1.4	Menurunnya kemiskinan		
	2.1.4.1	Angka Kemiskinan	6,03
2.1.5	Menurunnya Tingkat Pengangguran		
	2.1.5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,35
2.1.6	Meningkatnya keadilan gender		
	2.1.6.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,93
	2.1.6.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	84,65
3.1.1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan		
	3.1.1.1	Persentase jalan kota dalam kondisi baik	72%

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN			TARGET
	3.1.1.2	Persentase rumah sehat	92.04%
4.1.1	Menurunnya angka gangguan KAMTIBMAS dan pelanggaran Peraturan Daerah		
	4.1.1.1	Persentase menurunnya pelanggaran KAMTIBMAS	7
	4.1.1.2	Persentase menurunnya pelanggaran PERDA	19,06
4.1.2	Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak		
	4.1.2.1	Kota Layak Anak	Pratama
4.1.3	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas		
	4.2.1.1	Angka kecelakaan lalu lintas	120
4.1.4	Meningkatnya lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat		
	4.1.4.2	Indeks Kualitas Udara	46
	4.1.4.3	Indeks Kualitas Air	30
	4.1.4.4	Adipura	Kirana
5.1.1	Birokrasi yang bersih, melayani dan akuntabel		
	5.1.1.1	Opini BPK atas laporan keuangan Daerah	WTP
	5.1.1.2	Nilai SAKIP	BB
	5.1.1.3	Nilai rata-rata Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	79,68

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	81.103.861.500
2.	Program peningkatan disiplin aparatur	3.218.041.900
3.	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	781.493.300
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.472.643.000
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	3.625.829.300
6.	Program Pendidikan Kedinasan	1.720.010.000
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	5.618.461.400
8.	Program Keluarga Berencana	1.723.051.000
9.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	507.923.800

10.	Program pembangunan jalan dan jembatan	17.417.800.600
11.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.364.500.000
12.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	3.316.950.000
13.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	4.117.326.900
14.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.519.699.400
15.	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	134.700.000
16.	Program Pengembangan dan Pengendalian Ketahanan Pangan	1.843.460.000
17.	Program pengembangan data/informasi	2.831.922.200
18.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	8.430.126.000
19.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.261.350.700
20.	Program Pengembangan Nilai Budaya	933.340.000
21.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	2.559.954.200
22.	Program Pengembangan Perumahan	4.000.000.000
23.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	473.600.000
24.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	28.103.210.900
25.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	5.945.400.000
26.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	728.670.000
27.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.926.640.000
28.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	328.320.000
29.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	235.192.600
30.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	394.467.800
31.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2.310.236.000
32.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	123.460.000
33.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	990.388.000
34.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	802.580.000
35.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.683.426.000
36.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.654.404.900
37.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	1.205.679.400
38.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.460.113.700
39.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.684.032.800
40.	Program rehabilitasi hutan dan lahan	365.658.000
41.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	86.999.092.400

42.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	144.236.000
43.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	192.791.000
44.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	778.006.600
45.	Program pengembangan Kemitraan	794.936.000
46.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1.717.770.000
47.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	1.468.706.900
48.	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	137.024.300
49.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	19.256.615.500
50.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	600.000.000
51.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	175.800.000
52.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	353.662.800
53.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	89.480.000
54.	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	113.680.000
55.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	124.470.000
56.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	590.000.000
57.	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1.403.196.400
58.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	752.450.000
59.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	500.000.000
60.	Program penataan struktur industri	300.000.000
61.	Program Pendidikan Non Formal	1.988.000.000
62.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.354.003.200
63.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.081.094.200
64.	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	210.000.000
65.	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1.985.096.300
66.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1.048.000.000
67.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	25.717.636.600
68.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	1.181.532.200
69.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	8.778.482.000
70.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	1.690.400.000
71.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	1.822.242.000
72.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	859.900.000
73.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	909.278.000
74.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.152.721.200

108. Program Perencanaan Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman	600.000.000
109. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	826.368.000
110. Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan	2.996.290.000
111. Program Pengendalian Banjir	6.815.600.000
112. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	74.000.000.000
113. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	408.724.000
114. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	143.858.700
115. Program Perencanaan Tata Ruang	991.187.500
116. Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2.099.608.000
117. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Investasi	1.469.144.000
118. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	32.589.230.500
119. Program Pengelolaan/ Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	41.383.993.000
120. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	2.853.584.000
121. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	23.619.325.000
122. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	773.044.000
123. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	5.085.829.100
124. Program kerjasama informasi dengan mas media	3.297.685.600
125. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	1.354.003.200
126. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1.252.236.300
127. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3.002.646.800
128. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	610.925.300
129. Program Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Wilayah Kecamatan	32.589.230.500
130. Program Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan	234.176.162.000
131. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	923.527.000
132. Program Pembinaan dan Pengembangan Sarana Perekonomian	2.150.637.000
133. Program Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	620.000.000
134. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	76.000.000
135. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	338.023.900
136. Program Pencegahan Korupsi	156.141.800
137. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.057.477.600
138. Program Upaya Kesehatan Perorangan	2.048.260.000

75.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.887.987.000
76.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	92.512.000
77.	Program pengembangan budidaya perikanan	1.044.808.000
78.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	423.002.600
79.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1.185.000.000
80.	Program peningkatan pengendalian polusi	338.198.000
81.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	5.617.206.600
82.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.093.101.400
83.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.466.749.600
84.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	424.197.500
85.	Program pendidikan politik masyarakat	814.569.000
86.	Program Pengembangan Budaya Baca Masyarakat dan Pembinaan Perpustakaan	3.022.661.200
87.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.248.378.800
88.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1.586.280.000
89.	Program perencanaan pembangunan daerah	3.751.085.500
90.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	5.870.796.000
91.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	7.627.981.500
92.	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	298.080.000
93.	Program Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Masalah Sosial	924.769.000
94.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	271.566.000
95.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1.017.680.200
96.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	9.592.898.300
97.	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	5.804.286.700
98.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	862.106.000
99.	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	413.600.000
100.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1.740.253.300
101.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	11.589.204.000
102.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	5.639.302.000
103.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	49.697.000
104.	Program Pengelolaan Kekayaan Seni dan Budaya	200.000.000
105.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	3.002.646.800
106.	Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	500.000.000
107.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	14.782.600.000

Mojokerto, 31 Oktober 2017

WALIKOTA MOJOKERTO



MAS'UD YUNUS